# PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN 2017

## (Studi Tentang Hubungan Organisasi Ekstra Kampus dan Partai Politik Mahasiswa)

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat


Oleh:

**IWAN FARIS**

**NIM: E04213041**

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**


**2018**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Iwan Faris

NIM : E04213041

Prodi : Filsafat Politk Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
54460AFF083121358
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Iwan Faris

E04213041



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Ivan Faris** Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 Juli 2018

Pembimbing,

**M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si**
**NIP. 198202102009011007**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Iwan Faris* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 23 Juli 2018

**Mengesahkan**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**

**Dekan,**

Dr. Kunawi, M.Ag.
NIP.196409181992031002

**Tim Penguji:**
**Ketua,**

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si
NIP.198202102009011007

Sekretaris,

Laili Bariroh, M.Si.
NIP.197711032009122002

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP.196909071994032001

Penguji II,

Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP.197411102003121004



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iwan Faris
NIM : E04213041
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat Politik Islam
E-mail address : iwanfariss@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Partisipasi politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09-Agustus-2018

Penulis

( Iwan Faris )
*nama terang dan tanda tangan*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika organisasi ekstra kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017, serta hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya mahasiswa tahun 2017. Metode penelitian dalam skripsi ini dikaji dengan metode penelitian kualitatif, yaitu kajian lapangan (*field research*) dengan teknik *Purpossive Sampling*.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran organisasi ekstra kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017 yaitu mampu menyusupkan pemikiran kepada mahasiswa, mencari dukungan melalui anggota organisasi ekstra PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dengan strategi itu lebih mudah untuk mendapatkan suara mahasiswa. Sedangkan hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya mahasiswa tahun 2017 bahwa munculnya partai politik mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang di dirikan oleh oraganisasi ekstra yang bertujuan untuk lebih memudahkan pendaftaran pencalonan presiden mahasiswa dan akan lebih mudah mendapatkan kader-kader bila anggota organisasi ekstra mampu menduduki kursi jabatan di setiap distriknya lebih utamanya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Univrsitas. Dengan demikian partisipasi tersebut merupakan bentuk partisipasi mobilisasi.

**Kata kunci:** *Partisipasi, PEMIRA, Organisasi dan Partai politik Mahasiswa.*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**ABSTRAK** ..... **ii**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **iii**

**PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iv**

**PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **v**

**MOTTO** ..... **vi**

**PERSEMBAHAN** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 8

E. Definisi Operasional ..... 9

F. Penelitian Terdahulu ..... 10

G. Metode Penelitian ..... 12

H. Sistematika Pembahasan ..... 21

**BAB II KAJIAN TEORI** ..... **23**

A. Pengertian Partisipasi Politik ..... 23

B. Ideologi Politik ..... 37

C. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa ..... 41



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB III SETTING PENELITIAN ..... 45**

A. Deskripsi Penelitian ..... 45

B. Sejarah Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 45

C. DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) ..... 50

D. Organisasi Ekstra Kampus ..... 50

E. PAREM (Partai Republik Mahasiswa) dan PRM (Partai Revolusi Mahasiswa) ..... 52

F. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017 ..... 54

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ..... 58**

A. Organisasi Ekstra Kampus dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Raya UINSA Tahun 2017 ..... 58

B. Hubungan Organisasi Ektra dengan Partai Poltik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Tahun 2017 ..... 76

**BAB V PENUTUP ..... 88**

A. Kesimpulan ..... 88

B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan insan intelektual yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah sebagai tempat belajar, berhimpun dalam organisasikemahasiswaan juga merupakan sarana belajar bagi setiap mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial dan kemampuan religiusnya. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan miniature state atau student goverment yang melaksanakan tugas dan fungsi seperti sebuah negara.

Mahasiswa merupakan bagian elemen penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Hal tersebut karena mahasiswa sendiri memiliki beberapa peran seperti yang diungkapkan purnama yaitu antara lain sebagai *iron stock*,sebagai *guardian of value,* dan sebagai *agent of change*.[1] Peran mahasiswa sebagai *iron stock*yaitu mahasiswa diharapkan sebagai manusia tangguh untuk masa depan. Sebagai *guardian of value,* mahasiswa berperan sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Peran lainnya yaitu sebagai *agent of change,*

[1] Purnama, *Peran Fungsi dan Posisi Mahasiswa* di akses dari *http://geowana.wordpress.com (selasa, 4 April 2018)*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa mendapat peran sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat.

Pendidikan politik kalangan mahasiswa dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Peran dari organisasi kemahasiswaan ini bukan hanya sebagai ladang ilmu politik yang sifatnya teoretis, namun organisasi semacam ini merupakan sarana pendidikan poltik yang sifatnya praksis. Kaitannya dengan pendidikan politik pada mahasiswa. Pendidikan politik berperan mensosialisasikan nilai-nilai politik yang dikandung sistem politik yang ideal. Melalui ini mahasiswa akan mempunyai standar penilaian terhadap sebuah sistem politik, dimana secara formal di tingkat tinggi yang memiliki bobot paling besar tentang materi pendidikan politik, pendidikan Pancasila. Untuk itu, pendidikan politik senantiasa bermuatan nilai-nilai yang diharapkan oleh sebuah sistem politik.[2]

Organisasi kemahasiswaan merupakan hak bagi setiap mahasiswa. Seperti diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 77 ayat 2:[3]

1. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa.
2. Mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.
3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa

---

[2]Mubarok, A. I. 2008. *Pengaruh Pendidikan Politik di Organisasi Kemahasiswaan terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Mahasiswa GMNI dan HMI di UPI Bandung)*. Vol 1 No 1, 2008

[3]Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan
5. pengabdian kepada masyarakat.

Mahasiswa merupakan golongan masyarakat yang mendapatkan pendidikan tertinggi, mempunyai prespektif luas untuk bergerak diseluruh aspek kehidupan serta merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan akademis dan politik. Mahasiswa merupakan cendikiawan masa depan yang nantinya akan terjun kedalam dunia nyata dalam hal ini yaitu di sosial. Oleh karenanya mahasiswa berorganisasi dengan membentuk student goverment dalam rangka pengembangan dirinya.

Organisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala aturan, diharapkan tumbuh pola kesadaran semacam itu saat sudah terjun ke masyarakat. Arus demokratis yang melanda Indonesia di akhir rezim orde baru ternyata turut berpengaruh pada model organisasi mahasiswa tingkat Universitas.Hampir seluruh Universitas di Indonesia sejak saat itu menerapkan bentuk organisasi yang mengapdosi sistem pengelolaan suatu Negara. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah nama model organisasi mahasiswa yang dimaksud. Mahasiswa sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan mahasiswa yang lain, interaksi tersebut dapat dilakukan dengan aktif dalam organisasi atau lazim dikenal dengan istilah organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial politik. Aktivitas tersebut dapat dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada fenomena pemerintahan mahasiswa sebagai wujud dari politik yang ada dikampus. Fokus politik kampus merupakan segala kebijakan yang digulirkan oleh lembaga intra mahasiswa itu sendiri atau oleh birokrasi kampus seperti jurusan, fakultas atau universitas. Politik kampus dalam konteks internal dapat dilihat dari pemerintahan mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa lahir dari kebutuhan mahasiswa untuk mengaspirasikan, menyalurkan dan menuntut hak-hak politik. Basis keberadaan pemerintah mahasiswa adalah mahasiswa secara keseluruhan, sehingga partisipasi mahasiswa dalam politik kampus menjadi paling utama.

Partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Pertisipasi politik dalam konteks ini merupakan keikutsertaan atau keterlibatan mahasiswa dalam agenda-agenda politik, seperti pemilihan umum raya, penandatanganan petisi, beraudiensi dengan birokrasi kampus, menghadiri kongres atau musyawarah mahasiswa, aksi massa dan lain sebagainya yang bertujuan untuk merealisasikan hak-hak politik mahasiswa.[4]

Saat ini mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengalami berbagai dinamika dalam aktivitas organisasi. Dinamika tersebut yang *pertama*, tingkat partisipasi mahasiswa terhadap pemilihan umum raya Universitas sangat jauh dari kata maksimal, kalangan mahasiswa lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak menahu bagaimana proses berlangsungnya pesta demokrasi yang telah diselenggarakan itu. *Kedua*, peran Dewan Eksekutif

[4]Maran, Rafael Raga,*Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2001 Hal 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya oleh seluruh mahasiswa dapat dipahami bahwa keberlangsungan kegiatan organisasi mahasiswa merupakan system demokrasi Indonesia yang melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilu Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, meskipun tidak semua mahasiswa ikut andil dalam pemilu ini,dan seharusnya momentum ini dijadikan media pembelajaran demokrasi di kampus yang nantinya menjadi pembentuk budaya politik kampus, namun realita yang ada berbanding terbalik.

Membangun demokrasi dalam kampus dengan sebuah perhelatan Pemilihan Umum Raya. Sebuah even yang tidak saja menjadi ajang mengamati geliat gerak politik mahasiswa di kampus, akan tetapi lebih dari itu adalah mengfungsionalkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden kampus. Sebenarnya urgensi atau arti penting dari Pemilu raya adalah sarana untuk mengajak mahasiswa berpartisipasi peduli pada kampus. Menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin yang berintegritasatau kesempurnaan moral dan kinerja. Sehingga kepemimpinan politik mahasiswa tidak lagi stagnan pada gagasan atau kepemimpinan lama yang barangkali tidak lagi produktif.

Segala cara sudah dilakukan uji coba, dari sistem pemilihan langsung, sampai dengan sitem pemilihan tidak langsung/keterwakilan (parlemeter). Namun dalam hal ini, banyak dari kalangan mahasiswa yang masih belum sadar akan pentingnya momentum ini, guna menentukan arah masa depan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa sendiri. Mindset yang terkonstruk pada pola pikir mahasiswa yang menjadikan adanya dinamika stagnan, seolah menjadi problem tersendiri. Mahasiswa menganggap bahwa sistem pemilihan raya ini sudah menjadi ajang bagi para aktivis kampus, dalam hal ini adalah mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Tanpa tidak disadari bahwa mahasiswa ekstra mengayomi serta mengembangkan organisasi yang di ikuti dengan cara menduduki kursi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan sampai Presiden Mahasiswa.

Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memberikan peranan penting dalam memberikan pendidikan politik. Organisasi ekstra kampus itu sendiri diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Surabaya Selatan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Surabaya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunanan Mahasiswa Islam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Melihat realita organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya saat ini masih terdapat banyak permasalahan, salah satunya yaitu sikap apatis mahasiswa terhadap aktivitas organisasi tertinggi intra kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa.Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan adalah gejala apatisme mahasiswa terhadap organisasi ekstra kampus yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan kemahasiswaan oleh lembaga, kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi, menurunnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap kinerja organisasi, serta adanya pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa menjadi seorang aktivis itu harus siap untuk kuliah lama. Pentingnya pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan ini sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjadi pelaku politik yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Selain itu, dapat membawa masyarakat secara umum untuk menciptakan sistem politik seperti itu. Hal yang diharapkan dengan adanya pendidikan politik dalam organisasi organisasi di kemahasiswaan yaitu dapat menumbuhkan partisipasi dan sosiologi politik bagi mahasiswa.

Selain itu, dengan julukan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai *agent of change*, mahasiswa bisa memberikan perubahan bagi perilaku politik masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti "Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2017 (Studi kasus Hubungan Organisasi Ektra Kampus dan Partai Politik Mahasiswa)."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana organisasi ekstra kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya mahasiswa tahun 2017?

## C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi organisasi mahasiswa ekstra kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa Universits Islam Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya mahasiswa tahun 2017.

## D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat di kembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi kepada para akademisi baik itu mahasiswa, aktivis, atau peneliti lain yang memiliki ketertarikan pada masalah partisipasi politik mahasiswa.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menciptakan kesadaran bagi mahasiswa dan pendidikan politik tingkat mahasiswas, sehingga dapat dinikmati bagi generasi mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Definisi Operasional

1. Partisipasi politik

   Partisipasi politik merupakan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi tersebut dalam proses politik serta perumusan kebijakan publik merupakan sistem dan aturan hukum, tanpa di topang oleh aturan hukum dan penegaknya secara konsekuen partisipsi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.[5]

2. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa

   Pemilihan Umum Raya Mahasiswa merupakan demokrasi di tingkat kampus yang menjadi miniatur pesta demokrasi bangsa, pemilihan umum raya dilakukan tiap tahun sekali sebagai ajang pemilihan perangkat lembaga kemahasiswaan. pemira juga sebagai sarana atau wadah pendidikan politik serta media mengenal sistim dari negara kita.

3. Organisasi Ekstra Kampus dan Partai Politik Mahasiswa

   Organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang aktivitasnya berada di dalam atau luar lingkup universitas atau perguruan tinggi. Biasanya berafiliasi dengan partai politik dan pemerintahan tertentu walaupuan tidak secara eksplisit dan mempunyai nilai-nilai nasionalis yang sangat kental dalam membangun bangsa dan negara karena sudah jelas bahwa organisasi mahasiswa ekstra universitas ini berafiliasi dengan partai politik yang menjadi

[5]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Mediasarana, Jakarta. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan berdirinya negara dan pemerintahan saat ini. Partai politik mahasiswa dalam konteks ini yaitu mendukung dari lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa sebagai penyalur aspirasi serta pendidikan politik mahasiswa dalam tataran pemerintahan baik dalam kampus.

## F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian yang mempunyai kesimpulan berdasarkan objek yang diteliti. Di bawah ini penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Yogie Allhafizh meneliti pada tahun 2016 "*Perilaku Golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*". Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemira yang dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung 2016 jumlah partisipasi mashasiswa bisa dikatakan sungguh memeprhatikan. dari hasil penelitian ini disarankan agar mahasiswa menggunakan hak pilihnya dengan baik, menggikuti kampanye calon dengan baik. Dari data yang ikut berpatisipasi yaitu 460 mahasiswa dari jumlah keseluruhan pemilih mahasiswa kurang lebih 1300 mahasiswa. Pemira tersebut dapat dikatakan gagal karena lebih dari 50% pemilih tidak mengunakan hak pilihnya.
2. Penelitian oleh Mohammad Ridwan Saidi pada tahun 2015 "*Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Raya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*". Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa yang pertama adalah proses pelaksanaan pemilu raya Fakultas Ilmu Sosisal Univeristas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malang tahun 2015 terdapat kegiatan pendaftaran kandidat pada lembaga eksekutif fakultas dan kandidat anggota lembaga legislatif fakultas, terdapat calon tunggal pada kandidat pemimpin BEM FIS, HMJ geografi, HKN serta HMPS. Kedua bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilu raya UM tahun 2015 yaitu megunakan hak pilih salah satu tim sukses calon bupati HMJ geografi melakukan lobbiying dengan beberapa mahasiswa jurusan geografi secara non formal. Ketiga faktor penunjang dan faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa yaitu satu, mahasiswa yang memiliki sikap peduli terhadap organisasi FIS UM berupa fasilitas-fasilitas untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Dua, faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU masih kurang dan terdapat calon tunggal pada kandidat dari beberapa lembaga eksekutif fakultas.

3. Penelitian ini oleh Khoyin Munawaroh meneliti pada tahun 2012 " *Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan BEM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember*". Hasil dari penelitian ini terdapat fenomena partisipasi mahasiswa dalam pemilu gubernur badan eksekutif mahasiswa. Diperoleh rendahnya kesadaran dan tingakt partisipasi politik mahasiswa dikarenakan adanya skeptisme pada sistem dan pelaku birokrasi di tubuh organisasi BEM itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dasar. Metode penelitian akan menjadi alat bagi peneliti dalam melakukan analisis data yang ada. Sehingga, dapat menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemelihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017 Studi Kasus Hubungan Organisasi Ekstra Kampus dan Partai Politik Mahasiswa", maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Secara Bahasa kualitatif berarti meninjau berdasarkan mutu.[6] Banister Et Al mendeskripsikan metode penelitian kualitatif, sebagaimana yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, bahwa inti dari penelitian kualitatif adalah sebagai suatu metode untuk menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena, sebagai metode untuk mengeksplorasi fenomena, dan sebagai metode untuk memberikan penjelasan dari suatu fenomena yang diteliti.[7]

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna. Karena metode kualitatif dapat menggali data yang bersifat proses kerja, perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, sikap mental,

---

[6]Bambang Murhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, 275.
[7]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan, etos kerja dan budaya yang di anut oleh individu maupun kelompok orang dalam lingkungan kerja. Sehingga, tujuan dari penelitian dapat tercapai.[8]

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Menurut Jhon W. Creswell, penelitian kualitatif studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata kontemporer. Peneliti studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu, studi kasus kolektif yang memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan satu persoalan penting dari berbagai prespektif, studi kasus intrinsik yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, karena dianggap unik atau tidak-biasa. Dalam artian, peneliti menguraikan secara mendalam bagaimana partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini bertempat di wilayah kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Peneliti memelilih lokasi peneletian tersebut dengan alasan pertama, karena tempat ini mudah terjangkau oleh peneliti serta menghemat biaya. Kedua, karna di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya lebih banyak organisasi mahasiswa dan sering adanya keganjalan dalam pemilihan umum raya.

[8]Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang dapat memeberikan data tentang keadaan atau hal-hal yang berkaitan tentang penelitian yang berlangsung. Peneliti dan informan memeliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu memberikan tanggapan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purpossive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.[9]

Pengambilan informan dilengkapi dengan penentuan informan yang telah dijadikan sebagai narasumber, bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Berikut informan penelitian:

a. Abdulloh Moh Rifqi sebagai ketua BAPILU PAREM.
b. Muhammad Said sebagai ketua umum Partai Revolusi Mahasiswa UINSA Surabaya.
c. Iqbal Khoiri sebagai mahasiswa aktif fakuktas ekonomi dan bisnis, Jurusan Ekonomi Syariah, serta ketua KOPURWA Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Tahun 2017.
d. Abdul Mahen sebagai ketua umum PMII komisariat Tarbiyah cabang Surabaya Selatan.

[9]Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Fajar Interpratama, 2007), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Faiz Khan sebagai ketua umum PMII Komisariat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
f. Nur Rochman sebagai ketua umum Partai Republik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
g. Jaka Yulianto sebagai mahasiswa aktivis serta ketua LPM Solidaritas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
h. Adi aktivis kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang jelas dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari informasi yang mengarah kepada penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bisa berperan sebagai instrumen penelitian, disamping juga bantuan dari pihak yang benar-benar mengetahui tentang meningkatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum raya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Untuk itu, jenis dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data pertama di lapangan atau sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[10] Data primer ini, diperoleh dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan yang disajikan melalui wawancara secara langsung. Penentuan sumber

[10]Burhan Bungin, *Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penetuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu atau di acak.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh ke dua setelah data primer. Tidak menutup kemungkinan peneliti sulit atau tidak mendapatkan data dari sumber primer dikarenakan ada sesuatu hal yang sifatnya sangat pribadi. Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai sarana memperoleh data. Sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pembanding dari data primer yang telah diperoleh.[11] Data sekunder yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data atau dokumen yang ada kaitannya dalam penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

1) Informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2) Dokumen, yaitu berupa tulisan atau catatan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui data mengenai partispasi dalam pemilihan umum raya.

[11]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Airlangga University Surabaya: Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitiannya adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Nasution mengamati bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang jauh dapat diobservasi dengan jelas. Sanafiah faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpastisipasi, observasi yang secara terang-terangan atau tersamar dan observasi yang tak berstruktur.[12]

b. Metode Wawancara.

Burhan Bungin berpendapat bahwa, "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber atau informan."[13]

---

[12]Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D cetakan XXI* (Bandung: Alfabet, 2014), 226.

[13]Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penggalian data, dengan cara menanyakan langsung kepada informan. Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan spontan atau menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti merekam atau mencatat hasil dari wawancara.

c. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan cenderung menjadi data sekunder.[14]Pemakaian metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari datamengenaihal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, ilmiah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi, akan mendukung hasil penelitian dengan metode wawancara. Sehingga, hasil penelitian lebih terpercaya. Tetapi, peneliti perlu mencermati dari dokumentasi, karena tidak semua dokumentasi memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.[15]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data penelitian kualitatif, biasanya dilakukan setelah semua data terkumpul. Baik data yang digali melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Analisis data pada penelitian

[14]Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D cetakan XXI* (Bandung: Alfabet, 2014), 277.
[15]Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh sampai pada titik jenuh. Adapun teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman.

Langkah-langkah analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:[16]

a. Langkah pertama adalah reduksi data.

   Alur ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi dalam penelitian ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya.

b. Langkah kedua adalah penyajian data.

   Mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami dan penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

c. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan.

   Dalam hal ini peneliti meyimpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yakni yang berkaitan dengan hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam pemilihan umum raya.

---

[16]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (ALFABETA, CV, Bandung, 2013), 246-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor utama. Maka dalam melakukan keabsahan data peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji kredibilitas data. Menurut Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan member check. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode triangulasi dalam melakukan teknik keabsahan data.[17]

a. Triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[18]

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan

[17]Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 27.
[18]Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data.[19]Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi data sebagai berikut:

1) Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi.
2) Penulis meneliti apa yang dikatakan informan tentang organisasi ekstra dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa terkait pemilihan umum raya, dengan mengecek data yang sudah ada apakah sesuai atau tidak.
3) Membandingkan pendapat atau perspektif informan satu dengan informan yang lain.
4) Membandingkan wawancara dengan isi dokumen.

Dengan demikian data yang dikumpulkan peneliti dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan runtutan dan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

[19]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang kerangka teoretik meliputi konsep partisipasi politik.

Bab ketiga, berisi tentang setting penelitian yang membahas deskripsi umum lokasi penelitian.

Bab keempat, pada bab ini berisi penyajian dan analisis data serta memaparkan hasil penelitian.

Bab kelima, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)*. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan sebagainya.[1]

Teori partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiata-kegiatan politik baik bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada abad 14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya, dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaisance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17, abad 18 dan abad 19.

[1]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2008, Hal 1-7



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik merupakan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi tersebut dalam proses politik serta perumusan kebijakan publik merupakan sistem dan aturan hukum, tanpa di topang oleh aturan hukum dan penegaknya secara konsekuen partisipsi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.

Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat pedagang, tukang, orang-orang professional, buruh kota, wiraswasta, industri, petani desa, dan sebagainya, menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih las dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.

1. Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partispasi lebih luas dalam proses politik.[2]
   a. Modernisasi

      Ketika penduduk kota baru yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyaj menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

   b. Perubahan-Perubahan Struktural Kelas Sosial

      Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah

[2]Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* ( Yogyakarta: Gadja Mada University, 1993) 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik

c. Pengaruh Kaum Intelektual Dan Komunikasi Massa Modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

d. Konflik di Antara Kelompok-Kelompok Pemimpin Politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan geraka-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

Dalam arti sempit pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi politik, pertam, sosialisasi ini berjalan terus-menerus selama hihup seseorang. Kedua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dapat tumbuh dan meningkat karena faktor-faktor modernisasi, kesadaran politik melalui pendidikan politik.

Herbet Mcclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekalipun, fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi yang untuk mempengaruhi pembuatan keputusan-keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dalam hal ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan serta legal atau ilegal. Closky berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mereka yang mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.[3]

[3]Utsman Ali http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-partisipasi-politik-menurut-pakar.html (senin, 09 April 2018, 23:45).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik merupakan cerminan dari sikap politik (*political behavior*) warga negara yang berwujud dalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik. Perilaku politik yang berkristal dalam wujud partisipasi politik yang berlangsung secara konvensional sebagai suatu keharusan yang berada dalam setiap sistem. Partisipasi yang berlangsung bersifat legal dan berada dalam ikatan normatif. Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni tanpa adanya paksaan.

Pada negara-negara totaliter, partisipasi politik telah dipola menurut kebijaksanaan elit berkuasa dalam hal ini elit pemerintahan, elit partai. Partisipasi semacam ini yaitu partisipasi yang dimobilisasikan untuk tujuan ideologi. Terwujudnya partisipasi murni menunjukkan bahwa jalinan komunikasi antara elit infrastruktur yaitu elit berkuasa dengan jalinan harmonisme. Untuk mewujudkan partisipasi murni, maka masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan-pesan komunikasi termasuk transformasi nilai-nilai dan informasi tentang langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Indonesia merupakan negara demokrasi, yang memiliki konsep partisipasi politik betolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pemimpinan. Jadi partisipasi politik yaitu pengejawantahan dari penyelengaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses *input* dan *output* politik, seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati perintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.[4]

Menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu: *Pertama,* berknaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. *Kedua,* berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik. *Ketiga,* yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partaipartai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. *Keempat*, yaitu adanya perbedaan regional.

Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula

[4]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Mediasarana, Jakarta . Hal 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik. Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas. Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama,* aspek kesadaran politik terhadap pemerintah, yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain lain. *Kedua,* menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri bukan variable independen, artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman beroganisasi. Status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.[5]

2. Bentuk Partisipasi Politik

Paige dalam Cholisin merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan apatis, partisipasi militan radikal , dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan apatis. Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengemukakan bentuk-bentuk dari partisipasi politik, yaitu:

a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimping-pemimpin politik

[5]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Mediasarana, Jakarta . Hal 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

d. Mencari koneksi *(Contacting)* merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

e. Tindak kekerasan (*Violence)* juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri. Artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.[6]

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik itu sendiri meliputi:

f. Bentuk konvensional, yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal sah atau lazim dalam demokrasi modern, seperti pemberian suara (*voting),* diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.

g. Bentuk non konvensional, termasuk beberapa yang mungkin legal maupun illegal, penuh kekerasan dan revolusioner, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap

[6]Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang,* PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal 16-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hartabenda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.[7]

Kemudian David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.Kesadaran politik menyangkut aspek Kognitif yaitu, pengetahuan tentang apa, siapa, dan bagaimana pemerintahan yang berlangsung misalnya mengetahui nama pejabat atau presiden dan bagaimana kebijakannya. Aspek Afektif menyangkut tentang sikap mendukung atau menolak terhadap sistem politik yang berlangsung. Dan aspek Evaluatif adalah sebagai kontrol terhadap pemerintahan dengan dasar nilai–nilai moral yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi tingkat partisipasi politik.[8]Kesadaran individu dan masyarakat untuk melakukan partipasi politik sangat terkaitan dengan pemahaman mereka terhadap sistem politik. Secara langsung maupun tidak langsung disenangi maupun tidak masyarakat maupun penguasa mendapatkan sosilisasi politik dan pendidikan politik.Usaha seperti itu jelas bertujuan

[7]Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1993, Hal 47.
[8]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengarahkan proses sosialisasi poltik masyarakat ke arah tertentu, misalnya kearah perkembangan sikap dan tingkah laku politik yang demokratis.[9]

3. Menurut Angell dalam Ross, partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

   a. Usia

      Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

   b. Jenis Kelamin

      Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah bahwa dalam banyak masyarakat pernanan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

   c. Pendidikan

      Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap

[9]Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1993, Hal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

4. Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

Kegiatan yang dapat dikatergorikan sebagai partisipasi politik menunjukan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara itensif, yaitu kegiatan yang banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti memberikan suara dalam pemilihan umum besar sekali jumlahnya.

Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan parati atau kelompok kepentingan. Partisipasi politik merupakan semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi tersebut dalam proses politik serta perumusan kebijakan publik merupakan sistem dan aturan hukum, tanpa di topang oleh aturan hukum dan penegaknya secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuen partisipsi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.

Mahasiswa yang memiliki eksisitensi di negeri ini bahkan memiliki peran straregis yang berperan aktiv dalam kemerdekaan indonesia sebagai kasta sosial. Organisasi mahasiswa mempunyai peran penting dalam berafiliasi dengan partai politik dan pemerintahan tertentu walaupun tidak secara eksplisit dan mempunyai nilai-nilai nasionalis yang sangat kental dalam membangun bangsa dan negara karena sudah jelas bahwa organisasi mahasiswa ekstra universitas ini berafiliasi dengan partai politik yang menjadi landasan berdirinya negara dan pemerintahan saat ini. Menurut Friedman, M, peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut.[10]

Sejarah mencatat bahwa mahasiswa berperan penting terhadap bangsa ini melalui pergerakan-pergerakannya. Tentunya kita tidak lupa akan sejarah runtuhnya rezim Soeharto yang berhasil digulingkan oleh mahasiswa. Hal ini menjadikan perubahan yang sangat signifikan dalam perubahan dunia perpolitikan di Indonesia. Tuntutan-tuntutan terhadap persoalan-persoalan dalam momentum-momentum nasional menjadikan keterlibatan mahasiswa dalam berpolitik sangat besar. Karena sejatinya pergerakan mahasiswa ini merupakan perwujudan sebuah

[10]Ridwan, Muhammad, *Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pemilihan Umum Raya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosisal Univeristas Malang tahun 2015) 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

idealisme dan keinginan dalam menciptakan sebuah masysrakat yang adil dan berkehidupan yang lebih baik. Pergerakan mahasiswa ini terjadi karena adanya ketidakpuasan atas situasi yang ada juga kesenjangan-kesenjangan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Selain itu, pergerakan ini timbul karena adanya kesempatan bagi suatu gerakan itu. Kondisi yang sangat memadai dan memungkinkan untuk adanya suatu pergerakan mahasiswa. Selain itu, pergerakan ini karena adanya kemampuan *leadership* yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Berjiwa pemimpin yang memiliki karisma dalam mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi tujuan dari pergerakan.

Mahasiswa sudah sewajarnya melakukan perubahan yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat khususnya terhadap kecintaannya terhadap bangsa dan negara, namun hal ini sangat dianggap biasa oleh sebagian besar mahasiswa untuk ikut terjun langsung berpartisipasi terhadap perubahan yang baik untuk masyarakat. Dalam pandangan masyarakat organisasi intra maupun ekstra kampus sangat mempunyai kepentingan untuk memajukan bangsa dan negara, seperti melalui gerakan mahasiswa 1966 dan 1998, telah terbukti bahwa mahasiswa melalui organisasinya baik yang bersifat internal kampus maupun eksternal kampus mempunyai bargaing position tersendiri yang ikut serta dalam menentukan maju atau mundurnya negara dan bangsa.

Gerakan mahasiswa yang paling menonjol yaitu gerakan politik. Kita bisa memahami kondisi yang sangat tampak sebagai pembentuk karakter mahasiswa. Gerakan yang merupakan pencapaian suatu perubahan jangka panjang yang membentuk mahasiswa sebagai subjek politik kampus. Mahasiswa mendukung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan yang menurut mereka baik dan juga menguntungkan atau minimal mereka tidak berkerugian apa-apa. Gerakan politik juga merupakan gerakan dalam melakukan perubahan politik untuk suatu kekuatan tertentu.

## B. Ideologi Politik

Dalam kehidupan sehari-hari, ideologi cenderung menjadi istilah negatif yang terutama digunakan untuk mengelompokkan ide-ide yang bias dan/atau ekstrem. Sehingga, "lawan" dianggap memiliki ideologi, sementara "kita" dicirikan dengan prinsip, pragmatisme, atau akal sehat. Begitu juga dalam dunia akademis ideologi digunakan dengan cara seperti itu, walaupun pada umumnya pendekatan-pendekatan akademis lebih dicirikan oleh keagamaan.[11]

Secara teoritik, cukup banyak literatur yang membahas mengenaikonsep Ideologi itu sendiri. Ideologi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Moderniartikan sebagai asas pendapat, keyakinan yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan. Dalam kamus istilah pengetahuan popular ideologi diartikan sebagai suatu cita-cita yang merupakan dasar salah satu sistem politik, faham, kepercayaan dan seterusnya.[12]

Sementara dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai ideologi. Pengertian ideologi yang dimaksud adalah pengertian ideologi secara fungsional dansecara struktural. Secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, atau tentang masyarakat dan Negara yang

---

[11] Robert Eatwell dan Anthony Wright, *Ideologi Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), 3.
[12] Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap paling baik. Sedangkan ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.[13]

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutamaalam jagad sosial-politik. Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasikan secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode Mencapaiannya. Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam hal ini, manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teraliensi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup.

Dimensi "ide" dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara "keyakinan" dan "Utopi"memunculkan komitman, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan arah perjuangan, sekaligus memompakan semangat rela berkorban.[14]

Dalam arti fungsional, ideologi digolongkan secara tipologi dengan beberapa tipe yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Suatu

[13] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 32-33
[14] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideologi digolongkan sebagai doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, didoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau oleh aparat pemerintah. Sedangkan ideologi digolongkan sebagai ideologi pragmatisika ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu tidak didoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi,kehidupan agama dan sistem sosial. Contoh dari ideologi ini adalah ideologi liberalisme.[15]

Dalam ilmu sosial, Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan[16]. Teori Pancasila, komunis Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka yang sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik yang paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, falsisme konservatif dan demokrat sosial.[17]

---

[15] Ibid., 31.
[16] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ideologi_politik, (selasa, 18 April 2018, 23:45).
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologis antara blok barat yang mempromosikan liberalisme-kapitalisme dan blok timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, tata pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa ahli politik mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya Negara Unisoviet dan runtuhnya tembok Berlin di akhir dekade 1980-an.

Persaingan antar Negara ini cenderung masuk ke arah persaingan antar bangsa dan Negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi karena setiap Negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahtraan bagi masyarakatnya, dalam hal ini maka kedudukan ideologi politik suatu Negara akan berperan dalam mengembang suatu strategi yang mampu bersaing dengan Negara lain.[18]

Organisasi mahasiswa ekstra kampus merupakan kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berkumpul sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini populer di kalangan mahasiswa. Organisasi ini yang biasa disebut Organisasi ekstra yang lebih independen, kreatif, dan kritis. Posisi Organisasi ekstra ini yang tidak mendapat pembiayaan dari pihak kampus justru patut dipertahankan untuk menjaga independensi, kreativitas, dan daya kritis itu sendiri. Jenis Organisasi Ekstra ada bermacam-macam. Ada yang didirikan berdasar atas pemahaman agama ataupun pandangan secara khusus terhadap nilai-nilai nasionalisme. Contoh organisasi ekstra yaitu PMII, HMI, GMNI, dan juga IMM. Semua

[18] http://www.academia.edu/PENGERTIAN-ideologi-politik.html (rabu, 11 Juli 2018, 11:56)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi ekstra kampus ini memiliki tujuan yang baik untuk mengasah kemampuan intelektual dan kepemimpinan mahasiswa. Mahasiswa dalam hal ini perlu dilakukan sebagai strategi upaya mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam kondisi tertentu, organisasi politik mahasiswa ini diperlukan dan dibutuhkan untuk mencapai perubahan-perubahan itu. Organisasi ekstra bukan merupakan partai politik yang, karena pada dasarnya bendera mereka tidak pernah ikut serta dalam Pemilu di Indonesia. Juga tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa setiap warga negara kebebasan berserikat dan berkumpul dan membentuk suatu organinasi.

## C. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa

Pemilu umum raya mahasiswa merupakan sebuah agenda rutinan di kampus yang bertujuan untuk memilih pemimpin. Sistem dan prosesnya tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Adanya pemilu tersebut merupakan wujud sistem demokrasi dalam sebuah negara atau institusi. Oleh karena pemilihan umum juga merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden atau kepala daerah. Bahkan di negara yang tidak menjunjung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).[19]

Pemilihan umum yang dituntut demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu. Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang sudah memberikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang terkandung di dalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas pemilihan umum agar lebih baik dari sebelumnya.

Oleh karena itu kampus sebagai sebagai bentuk institusi yang menganut sistem demokrasi juga menekankan adanya pemilu sebagai media untuk memilih wakil mahasiswa yang sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Oleh karena itu baik tipe-tipe, tahapan atau sistem pemilu dalam kampus juga tidak jauh merujuk pada pemilu pada umumnya. Jika kita lihat di Indonesia ada dua tipe pemilu, yaitu distrik dan profesional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sistem Distrik

   Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang tercakup) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Di dalam sistem ini, satu wilayah kecil (yaitu distrik

[19] Marzuki, "Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999" (Disertasi, Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single member constituency*) atas dasar pluralitas. Kondisi pluralitas dapat terjadi apabila sejumlah partai atau calon mampu memperoleh suara yang lebih banyak atau besar dibandingkan dengan saingannya yang terkuat, sekalipun tidak berarti bahwa partai atau calon tersebut memperoleh suara paling banyak dibandingkan dengan kombinasi suara lawan-lawannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Distrik yaitu suatu sistem pemilihan dimana suatu daerah pemilihan (distrik) hanya memiliki seorang wakil.[20]

2. Sistem Proporsional

Sistem ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Sistem perwakilan proporsional ini adalah sistem di mana presentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dapat disimpulkan bahwa sistem ini adalah sistem pemilu yang sangat berorientasi pada partai atau kelompok-kelompok politik, karena keterwakilan dalam parlemen sangat tergantung pada suara yang diperoleh sebuah partai atau kelompok dalam pemilu.[21]

Apabila sebuah partai besar memperoleh suara 40 persen, maka partai tersebut harus mendapatkan kursi 40 persen, demikian juga dengan sebuah partai

[20] Muhammad Asfar, *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia* (Jakarta: PuSDeHAM, 2002), 113.
[21] Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil dengan 10 persen suara harus mendapat 10 persen kursi.[22] Oleh karena itu dalam sistem ini, masyarakat pemilih dibagi dalam beberapa unit besar wilayah dalam suatu negara. Suatu wilayah negara merupakan suatu daerah pemilihan, maka sisa suara di suatu daerah dapat ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah lain (*stembus accord*), sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilihan umum memperoleh kursi atau wakil di parlemen.

[22] Peter Harris dan Ben Reilly, *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator* (Jakarta: International IDEA, 2000), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# SETTING PENELITIAN

## A. Deskripsi Penelitian

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu kampus islam yang terletk sangat strategis karena berada di tengah kota yang menghubungkan antara Surabaya dan kota-kota yang lainnya misalnya Sidorajo, Mojokerto, Gresik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 117 Jl. A. Yani itu tidak jauh dari pemukiman kelurahan Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya yang banyak menyediakan jasa penginapan kost dan kontrakan yang sangat bermanfaat bagi mahasiwa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus. Letak geografis wilayah kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel menempati area ± 8 hektar dan di kelilingi pagar tembok.[1] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan perguruan tinggi islam yang memiliki 9 fakultas yaitu Ushuluddin dan Filsafat, Syariah, Adab dan Humaniora, Dakwah dan Komunikasi, Tarbiyah dan Keguruan, Ilmu sosial dan Politik, Ekonomi dan Bisnis, Psikologi, serta Sains dan Teknologi.

## B. Sejarah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pada akhir dekade 1950, beberapa tokoh masyarakat Muslim Jawa Timur mengajukan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam yang

[11]Asyhar, Ah. Rofiul, Politik Kekuasaan Kampus Dalam Tinjauan Perilaku Sosial, (Skripsi, Sosiologi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 52.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernaung di bawah Departemen Agama. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan itu, Profesor Soenarjo, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya Perguruan Tinggi Aagama Islam dimaksud.[2]

Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964. Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, lima dari 18 delapan belas fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya.

Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu, fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas)

[2]Asyhar, Ah. Rofiul, *Politik Kekuasaan Kampus Dalam Tinjauan Perilaku Sosial*, (Skripsi, Sosiologi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017) 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan satu Fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak pertengahan 1997, melalui Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, seluruh fakultas yang berada di bawah naungan IAIN Sunan Ampel yang berada di luar Surabaya lepas dari IAIN Sunan Ampel menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang otonom. IAIN Sunan Ampel sejak saat itu pula terkonsentrasi hanya pada lima fakultas yang semuanya berlokasi di kampus Jl. A. Yani 117 Surabaya. Pada 28 Desember 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya melalui Keputusan Menkeu No. 511/KMK.05/2009 resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum . Dalam dokumen yang ditandasahkan pada tanggal 28 Desember 2009 itu IAINSA Surabaya diberi kewenangan untuk menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Terhitung mulai tanggal 4 Desember 2013, IAIN Sunan Ampel berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berdasarkan keputusan Presiden Indonesia No. 65 Tahun 2013. Undang-undang no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengamanahkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan,ketakwaan kepada tuhan yang maha esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajuka ilmu pengetahuan, teknologi dengan menjujunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dunia serta kesejahteraan umat manusia.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi islam mempunyai tanggung jawab yang sama dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan kehidupan bangsa dan mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi yaitu melaksanakan program pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan disiplin keilmuan, melakukan penelitian dengan pendekatan multidisplener dan melakukan pengabdian pada masyarakat.

Dalam rangka mengembang amanat itu, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memiliki struktur kelembagaan yang diharapkan mampu mengembang amanat tersebut. Disamping itu melalui stuktur ini Universitas yang diresmikan pada tanggal 4 Desember 2013 mampu mengembangkan karakteristik sebagai mana disebut dalam platfrom Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mempunyai beberapa UKM (unit kegiatan mahasiswa) yang untuk mengembangkan karakter serta potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain yaitu :

1. Paduan Suara, berdiri pada tanggal 15 Januari 1988 yang bertujuan untuk menjadikan seni sebagai media untuk berdakwah dan belajar, sebab dengan kesenian agama lebih muda memasyarakat dan terdapat banyak ilmu di dalamnya.
2. Unit Kegiatan Pengembangan Intelektual, yaitu yang merupakan UKM bergerak dibidang kajian intelektual dan penelitian yang merupakan satu-satunya UKM penalaran yang dapat memperose segaligus menciptakan mahasiswa menjadi orang yang paling pintar se Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengembangan Tahfidul Quran, yang menghidupkan kegiatan yang bernuansa Al Quran baik dari sisi hafalan mampu pengembangan bacaannya di dalam kampus
4. Pencak Silat Setia Hati Terate, yang merupakan ilmu bela diri yamg bertujuan untuk membentuk keperibadian yang tanguh, bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
5. Seni Budaya, yang merupakan salah satu organisasi keseneian intra kampus yang berbeda di tingkat institute dibawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
6. Ikatan qori' qoriah mahasiswa, yang didirikan oleh Drs KH Chiznullah AR. Pada tanggal 3 maret 1989 yang bertujuan untuk memfokuskan pada bidang qurani seperti qiroah dan juga di isi dengan dialog tentang Al-Qur'an.
7. Pramuka merupakan salah oganisasi yang dilegalkan dengan tujuan mengenang salah satu penyiar agama islam di Jawa Timur dan untuk menerusakan cita-cita para ulama yang berjuang demi tegaknya Agama Islam sebelum kita.
8. Lembaga Pers Mahasiswa Solidaritas, yang merupakan untuk mencetak manusia yang pandai tulis menulis. Menjadi LPM Solidaritas pada tahun 1992 M sebelum tabloid solidaritas dan LPMI.
9. Olahraga, yang berdiri pada tanggal 9 April 1994 sebagai wadah untuk menampung serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidan Olahraga.
10. Mapalsa yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1992 yang bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan sesama pencinta alam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Menwa, yaitu organisasi yang dibentuk dengan tujuan mendidik anggota mampu bewawasan bela Negara, berintelektual dan olah keprajuritan dengan semboyan pejuang pemikir, pemikir pejuang.

## C. DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa)

Dewan eksekutif mahasiswa atau yang biasa disingkat DEMA merupakan lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif) yang dipimpin oleh ketua atau presiden dan dipilih melalui pemilu raya mahasiswa di setiap tahunnya berdasarkan suara terbanyak. DEMA juga merupakan wakil mahasiswa baik di dalam dan di luar kampus. Sebagai wakil dari mahasiswa, DEMA bertugas menaungi mahasiswa dan menjalin koordinasi dengan organisasi-organisasi intra kampus dan juga bertanggung jawab terhadap rektorat, di samping itu DEMA juga menjunjung tinggi AD/ART. Adapun susunan kabinet DEMA merupakan wewenang preogatif Presiden DEMA UIN Sunan Ampel Surabaya.[3]

## D. Organisasi Ekstra Kampus

Orgnisasi ekstra kampus merupakan organisasi mahasiswa yang aktivitasnya berada di luar lingkup universitas atau perguruan tinggi. Organisasi ekstra kampus biasanya berafiliasi (gabungan) dengan partai politik tertentu walaupun tidak secara keseluruhan. Dalam kampus UIN Sunan Ampel Surabaya

[3] AD/ART Keorganisasian Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, Bab IV pasal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali organisasi-organisasi ekstra yang juga membantu mahasiswa untuk memberi wawasan yang lebih luas tentang dunia kampus dan perkuliahan.

Organisasi ekstra tersebut di antaranya adalah: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), serta berbagai Organisasi Mahasiswa Daerah (ORMADA) yang merupakan organisasi yang terbentuk karena adanya latar belakang asal daerah yang sama, organisasi ini memang tidak semuanya ikut dalam politik kampus. Tetapi mereka juga sering dilibatkan sebagai basis masa tau suara dari partai peserta pemilu raya mahasiswa. ORMADA di UIN Sunan Ampel Surabaya yang mempunyai basis masa besar di kampus antara lain Himpunan Mahasiswa Surabaya (HIMABAYA), Ikatan Mahasiswa Gresik (IMAGRES), Ikatan Mahasiswa Bangkalan IKAMABA), Himpunanan Mahasiswa Sampang (HIMASA), Ikatan Mahasiswa Delta (IMATA) dan Himpunan Mahasiswa Lamongan (IKAMALA), dan seterusnya. Organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi yang sebagian besar anggotanya ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu raya mahasiswa. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka yang mengurusi ORMADA tersebut juga ikut terlibat dalam organisasi ekstra kampus dan partai peserta pemilu.

Organisasi-organisasi tersebut tersebar dalam dunia kampus dan mempunyai suara mayoritas atau minoritas. Dalam organisasi ekstra kampus di UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut yang sampai sekarang masih mendominasi yaitu dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), di kampus ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi PMII terbagi menjadi dua kubu yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya (PMII-S) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Islam Surabaya Selatan (PMII-SS). Mayoritas PMII-SS didominasi oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah, mungkin di karenakan fakultas tersebut lebih banyak mahasiswanya, sedangkan untuk organisasi lain seperti HMI, IMM, KAMMI, HTI dan lain-lain yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya anggotanya tersebar di semua fakultas. Di samping itu, organisasi-organisasi tersebut juga mempunya latar belakang dan ideologi yang berbeda-beda.

## E. PAREM (Partai Republik Mahasiswa) dan PRM (Partai Revolusi Mahasiswa) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Partai Politik Mahasiswa merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan suatu kepentingan, baik kepentingan anggotanya maupun kepentingan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel secara umum. Anggota Partai Politik Mahasiswa merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang sah secara administratif, untuk partai baru salah satu persyaratnya yaitu harus mempunyai sekurang-kurangnya 1000 suara, untuk partai lama sebanyak 250 suara setiap fakultas, dengan ketentuan di tiap-tiap distrik atau fakultas minimal mempunyai perwakilan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Partai Politik Mahasiswa bertujuan melambangkan demokrasi di lingkungan kelembagaan mahasiswa di bawah naungan institusional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai politik mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terdapat partai Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM). Partai Republik Mahasiswa (PAREM) merupakan partai republik mahasiswa yang mayoritas di dominasi oleh mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah, sedangkan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) diduduki oleh sebagian mahasiswa se-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Proses pemilihan umum raya hanya diikuti oleh dua Partai Politik Mahasiswa yaitu, Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Reformasi Mahasiswa (PRM). Partai Repulik Mahasiswa (PAREM) merupakan partai yang *incumbent* dalam pemilu raya mahasiswa tahun 2013. Partai ini mempunyai basis masa terbesar di fakultas tarbiyah. Sedangkan Partai revolusi Mahasiswa (PRM) juga merupakan partai *incumbent* yang mempunyai basis masa di setiap fakultas di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hubungan kedua partai tersebut dalam Pemilihan Umum Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menorehkan catatan buruk. Ajang yang seharusya menjadi tempat memilih calon secara demokrasi justru berubah menjadi kerusuhan. Itulah yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ini bukan pertama kalinya pemilihan raya menuai konflik. Dari tahun pertahun di setiap pemilihan raya pasti terjadi konflik. Ada beberapa faktor yang memicu konflik. Pertama, dalam penyelenggaraan pemilihan raya terkadang tidak netral. Ada banyak kasus yang yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggaraan terhadap kandidat tertentu. Kedua, Daftar pemilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap dalam surat suara. Ketiga, para organisasi elit kampus yang dominan bertarung di pemilihan umum raya masih menganggap politik hanya sebagai sarana untuk kekuasaan pribadi.

Perseteruan politik yang terjadi antara Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) dan Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dalam pemilihan presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang akan berlangsung tetapi masih mengalami perdebatan dan gugatan.

## F. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017

Pemilihan Umum Raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 di warnai keributan serta menjadi sorotan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tidak bisa dipungkiri lagi, pembahasan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ini menjadi kesensitivan bagi seluruh mahasiswa maupun alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya hampir keseluruhan mengikuti Organisasi ekstra walaupun itu ada sebagian yang berpartisipan. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa merupakan ajang demokrasi yang ditunggu oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk menduduki jabatan tertinggi mahasiswa yaitu Presiden Mahasiswa. Pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa 2017, menorehkan catatan buruk. Ajang yang seharusya menjadi tempat memilih calon secara demokrasi justru berubah menjadi kerusuhan. Itulah yang terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pelaksanaan Pemilihan Raya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ini bukan pertama kalinya pemilihan raya menuai konflik. Dari tahun pertahun di setiap pemilihan raya pasti terjadi konflik. Ada beberapa faktor yang memicu konflik, tetati di pemilihan Umum raya tahun 2017 sangatlah berbeda dengan tahun-tahun yang sudah menjadi panutan bagi regenerasi mahasiswa, karenanya sistem pemilihan raya tersebut yang berhak memilih hanya pemimpin dari organisasi intra diantaranya Himpunan Mahasiswa Prodi sampai ke Gubernur Fakultas (DEMA F).

Menjelang pemilu raya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, keadaan para mahasiswa mulai memanas khususnya yang mempunyai kepentingan mencalonkan diri menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Terjadi bentrok antar mahasiswa di blok M. Hal itu terjadi saat kempanye yang dilakukan oleh Partai Revolusi Mahasiswa bersama sejumlah tim suksesnya. Disinyalir dari LPM Solidaritas bahwasanya bentrok tersebut terjadi diduga karena ada mahasiswa yang tidak terima dengan keputusan Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA) yang menetapkan tanggal pendaftaran dan pemilihan yang begitu mendadak. Akibat tidak puas kepada kapurwa tersebut, mahasiswa yang mau mencalonkan diri untuk maju di pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tidak ada kesempatan, sehingga pada saat kempanya terjadi bentrok. Sebelumnya, Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sudah menetapkan satu pasangan calon Dewan Eksekutif Mahasiswa tanpa ada lawannya, yaitu Hosen Zaini dari fakultas Usuludin dan Mahmud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qudlori dari Fakultas Dakwah sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diusung dari Partai Revolusi Mahasiswa (PRM). Ketidak lolosan Partai Republik Mahasiswa(PAREM) dalam pesta demokrasi politik kampus Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun ini karena beberapa hal. Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA) tidak adil dan ada keberpihakan kepada salah satu calon. Beredarnya informasi dari Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA) mengenai waktu pencalonan sangat mendadak hingga partainya merasa keteteran dalam mempersiapkan administrasi pencalonnya.

Menanggapi hal ini, ketua Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA) Pemilu Raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Moh Iqbal menjalaskan, bahwasanya tidak lolosnya Partai Republik Mahasiswa (PAREM) karena tidak ada administrasi yang masuk dari parem ke Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA), padahal menurutnya sebelum hari pembukaan sudah di informasikan sebelumnya. pada saat berlangsung kampanye yang dilakukan oleh Partai Revolusi (PRM) di Blok M Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pihak Partai Republik Mahasiswa (PAREM) mendatangi lokasi untuk meminta bukti yang berupa Surat Keputusan kepada pihak Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) atas kampanye yang mereka lakukan dan menanyakan keberadaan Komisis Pemilihan Suara (KOPURWA). Namun pihak Partai Republik Mahasiswa (PAREM) pulang dengan tangan hampa dan tanpa kejelasan dari pihak Partai Revolusi Mahasiswa (PRM). Beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) adalah satu langkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi lawan politik untuk ikut serta meramaikan pesta demokrasi yang berlangsung dalam satu tahun sekali di Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dari pihak Parati Republik Mahasiswa (PAREM) merasa bahwa dijegal oleh lawan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Organisasi Ekstra Kampus dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilihan Umum Raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab II, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Dan sistem politik sendiri memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya.

Sedangkan partisipasi politik mahasiswa dalam konteks ini merupakan para mahasiswa di kampus Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang aktif serta memiliki hak untuk memilih pemimpin mahasiswa paling tinggi di organisasi intra yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Eksistensi mahasiswa dalam partisipasi politik dalam pemilihan umum raya di tentukan sejauh mana mereka mampu memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang bisa menampung aspirasi aspirasi untuk kemajuan dan kemakmuran mahsiswa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi dalam pemerintahan cenderung merujuk pada keterlibatan dan interaksi organisasi dan intruksi yang mempunyai tanggung jawab terhadap atau berhubungan dengan tindakan kolektif di bidang publik. Hubungan antara aktor dalam jaringan kerja merupakan ciri khas pemerintahan dan dinyatakan bahwa partisipasi dalam pemerintahan itu di pengaruhi oleh kebijakan, seperti organisasi komunitas yang memperoleh tanggung jawab dalam pemerintahan.

Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi merupakan kunci pemberdayaan, memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.[1]

Oraganisasi ekstra merupakan asosiasi mahasiswa dalam mengembangkan instansi yang di ikuti untuk mencapai visi yang sudah terorganisir, serta mereka mampu menghegemoni mahasiswa untuk menyatukan ideologi dan mencapai tujuan bersama Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA). Mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra PMII diyakini mampu membuat strategi untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Dalam kondisi tertentu, organisasi politik mahasiswa ini diperlukan dan dibutuhkan untuk mencapai perubahan-perubahan itu. Hal ini senadah dengan prespektif Prof, Dr. Abdul Haris, M.Ag beliau berkata bahwa mahasiswa yang mengikuti oraganisasi PMII di yakini mampu membuat

[1]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan pada konteks yang dihadapi, dalam hal ini yaitu pendidikan dan Gerakan.

Seperti halnya yang terjadi di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, organisasi ekstra mampu memberikan pemikiran atau pandangan kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan umu raya. Seperti halnya yang dikatakan oleh informan:

> "*Strategi yang kita gunakan yaitu memanfaatkan anggota kita yang sudah menjabat di HMJ, DEMA Fakultas sebagai sarana untuk mendapatkan KTM mahasiswa, karena biasanya HMJ dan DEMA itu lebih dipercaya oleh mahasiswa. Jadi target kita juga harus menghendel setiap HMJ DEMA tersebut agar lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan KTM mahasiswa*"[2]

Sama halnya yang dikatan oleh salah satu informan mengenai tentang bagaimana meningkatkan partisipasi mahasiswa .

> "*salah satu bentuk partisipasi ormek dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa adalah dengan memberikan kajian ketika mau ada moment-moment semacam PEMIRA untuk memberikan pengetahuan bagai mana pentingnya partisipasi mahasiswa dan menegetahui bagimana keadaan politik kampus*"[3]

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya melalui anggota organisasi ekstra yang sudah menjabat di HMJ dan Gubernur. Dalam hal ini organisasi ekstra memanfaatkan anggotanya untuk mencari massa yang berupa mengumpulkan KTM mahasiswa. Mengumpulkan KTM merupakan sebagian syarat administrasi untuk meloloskan partai dan calon yang di dukung dari partai tersebut.

---

[2]Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.
[3] Adi, *Wawancara*, 16 Juli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah.[4] Ide-ide tetap dilanjutkan oleh oragnisasi ekstra yang menjadi tim sukses dalam pemenangan calon presiden mahasiswa yang di dudukung untuk menyukseskan serta mencari lebih banyak massa untuk kemenangan pasangan calon yang di dukung. Seperti yang dikatakan narasumber yang menjadi tim sukses:

> "*Berbicara politik sangatlah tidak bisa menjadi patokan atau jaminan bahwa mahasiswa yang sudah kita ajak di hari pencoblosan mendukung kita, jadi kita tetap mengawal mahasiwa agar di hari pencoblosan tidak berubah pilihan*".[5]

Dalam hal ini mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari organisasi ekstra wajib untuk menyukseskan pemilu raya dan mendukung pasangan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dalam hal ini adalah kesepakatan partai politik mahasiswa. Narasumber di atas menyatakan bahwa pengawalan kepada mahasiswa untuk berpartisipan dalam pemilihan umum raya agar mendukung pasangan calon presiden terus dilakukan sampai di hari pencoblosan.

Sementara startegei tim sukses yang biasanya dilakukan oleh mahasiwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yaitu membuat konsensus dengan pimpinan organisasi yang dituju. Seperti halnya yang dikatakan oleh narasumber:

> "*Kita menarget organisasi ekstra yang mempunyai kader banyak, ketika kita sudah ada kesepakatan pada pimpinan organisasi yang saling*

---

[4]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 368.
[5]Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*menguntungkan, insyallah massa yang dimiliki organisasi tersebut keseluruhan ikut mendukung pasangan calon presiden kita, walaupun ada beberapa yang mungkin benci dengan pemilihan umum raya UINSA*"[6]

Narasumber menyatakan bahwa tim pemenangan calon presiden yang sudah terorganisir tak hanya mencari dukungan lewat anggota yang sudah menjabat di HMJ maupun Gubernur melainkan kepada Pimpinan organisasi lain, organisasi tersebut memiliki massa yang dianggap banyak serta solid dalam mendukung pemilihan umum raya mahasiswa Presiden Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal ini senadah yang di tulis di buku[7]*Partispasi Semu, Keterlibatan Warga dalam Pembanguanan Desa*: bahwa penting untuk disadari oleh segenap elemen masyarakat yang mengideasikan sebuah perubahan mendasar dalam hidup berbangsa dan bernegara, bahwa momentum otonomi daerah dan demokratisasi pasca rontoknya rezim otoriter itu merupakan momen penting yang tidak boleh sembarang diabaikan. Semanggat desentralisasi yang diusung oleh era reformasi telah membukak ruang politisi bagi warga untuk menjadi lebih aktif terlibat untuk penyelengaraan pemerintahan di komunitasnya masing-masing, tidak ketinggalan bagi warga bangsa yang bertempat di daerah pedesaan.

Herbet Mcclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama

---

[6]Abdulloh Moh Rifqi, *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2018.
[7]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah sekalipun, fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.[8]

Organisasi ektra yang lain seperti PMII, HMI, GMNI sampai ke organisasi daerah bersilaturahmi atau di sowani oleh partai politik mahasiswa yang terstruktur untuk menyukseskan acara pemilihan umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam buku yang ditulis oleh Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.[9] Partai politik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membuat strukur partai agar mempermudah kerja dalam memenangkan pasangan calon presiden yang di usung oleh partai.

> "*saya selaku ketua partai mengintruksikan kepada anggota saya untuk menjaga pos-pos yang sudah kita tentukan, pos-pos tersebut yang biasanya dibuat untuk membahas PEMIRA seperti warkop, atau tempat perkumpulan-perkumpulan para aktivis kampus*."[10]

Wawancara dengan ketua partai Partai Republik Mahasiswa (PAREM) tahun 2017 menyatakan bahwa ketua partai mengintruksikan jajarannya untuk mengetahui strategi partai Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) sebagai partai yang akan bersaing pada pesta demokrasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Anggota partai yang terstruktur tersebut di perintahkan untuk selalu

---

[8]Utsman Ali http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-partisipasi-politik-menurut-pakar.html (senin, 09 April 2018, 23:45).
[9]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 369.
[10]Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga berjalannya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa agar anggotannya mengawasi kepada mahasiswa atau organisasi ekstra yang sudah mendapatkan kesepakatan oleh pimpinan organisasi, supaya tidak berpindah dukungan. Pernyataan ketua partai Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Tahun 2017 merupakan antisipasi perpindahan massa yang sudah melakukan kesepakatan kontrak politik.

Kegiatan pemilihan mencangkup seluruh suara mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, akan tetapi juga sumbangan untuk kampanye serta bekerja dalam suatu pemilihan dan mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemelihan. Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) yang di dominasi oleh mahasiwa yang ikut organisasi ekstra PMII Cabang Surabaya, strategi dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum raya berbeda dengan Partai Republik Mahasiswa (PAREM) yang meminta dukungan kepada seluruh mahasiswa dari organisasi ekstra sampai intra. Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) hanya melakukan koersi dan menyatukan dukungan dengan anggota-anggota PMII Cabang Surabaya yang sudah menjabat di organisasi intra. Seperti dari hasil wawancara.

> "*Kampus UINSA ini di dominasi oleh PMII S, saya yakin bila anggota PMII S ini bersatu untuk mencapai visi yang sudah di konsep oleh pihak PMII S, tujuan tersebut akan mudah tercapai. Tetapi kan terkadang ada beberapa fakultas anggotanya ingin mengikuti pesta demokrasi, tapi ya harus bergantian soalnya dari pihak PMII S hanya mempunyai satu partai dan pencalonan presiden harus diusung oleh partai*".[11]

[11]Muhammad Said, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dikenal sebagai kampus pergerakan dikarenakan kampus tersebut memliki kader PMII terbanyak se Jawa Timur pada tahun 2015 di umumkan ketika Harlah PMII ke 55 yang bertempat di Masjid Akbar Surabaya. Anggota PMII Surabaya di setiap distrik/fakultas mempunyai anggota berbeda dengan PMII Surabaya Selatan yang anggotanya di dominasi dari fakultas Tarbiyah dan Saintek. Sehingga narasumber di atas meyakini bahwa memenangkan pemilihan raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya cukup memperkuat serta menyatukan ideologi untuk tujuan kepentingan bersama. Hal ini senadah dengan pendapat Bottomore, bahwa pihak kepentingan akan mengatasnamakan mayoritas untuk mencapai tujuan para kelompok yang sudah terorganisir.

Partisipasi politik di bedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif yang merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati perintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.[12] Konsensus yang menjadi salah satu kekuatan pemikiran sosio epistimologi, temaksud menunjukan tuntutan-tuntan kebenaran.Seperti yang dialami oleh partai politik mahasiswa Partai Republik Mahasiswa (PAREM) pra pemilihan umum raya Tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

> "*Dari pihak BAPILU PAREM jauh hari sudah melakukan koalisi dengan Fakultas Syariah, kontrak politik sudah disepakati bersama, melainkan mendekati pemilihan umum raya, kesepakatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya*"[13]

---

[12]Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, ( Jakarta: PT Grasindo Media Sarana) 142.
[13]Abdulloh Moh Rifqi, *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut narasumber, bahwa dari anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) jauh jauh hari sudah melakukan kontrak politik dengan Fakultas Syariah, namun dalam jangka hari kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara pihak Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Fakultas Syariah tidak sesuai dengan isi dari kontrak tersebut. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa Fakultas Syariah memegang erat pimpinan tertingginya dalam hal ini Komisariat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kampus tercinta kita ini di dominasi oleh organisasi ekstra yaitu PMII. Hal ini senadah dengan apa yang di tulis oleh Ramlan Subakti, bahwa konteks tersebut merupakan partisipasi pasif atau bisa di sebut pula komunikasi pasif yaitu komunikasi serta lobbiying yang tak membuahi hasil yang nyata.Salah satu bentuk-bentuk partisipasi menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yaitu kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.[14]

Pemilihan umum raya di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 mereka Partai Republik Mahasiswa (PAREM) peserta demontrasi juga menuntut hak hak mahasiswa dalam berdemokrasi, mereka juga menanyakan pemilu raya mahasiswa ini demokrasi yang seperti apa. Mereka menganggap politik jegal menjegal ini tidak pantas diterapkan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan tidak mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Sehingga pemilu raya tahun 2017 memunculkan

[14]Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994) 16-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kericuhan dalam demontrasi, akibat kericuhan tersebut menjadikan terhambatnya kontestan pemilu raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebagaimana yang dikatakan salah satu informan: "*Ini kampus besar, menurut saya sistem seperti PEMIRA 2017 tidak layak untuk dijadikan pedoman atau panutan bagi regenerasi mahasiswa politik yang akan datang*"[15]

Dari paparan di atas bahwa Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Tahun 2017 dianggap cacat bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya khususnya dari anggota PAREM. Menanggapi kericuhan yang terjadi saat pemilihan ini Ketua Kopurwa menjelaskan bahwasanya: "*karena ada profokasi dari para demonstran, hingga akhirnya keadaan tidak terkendalikan yang berujung bentrok. Dari anggota sanalah yang memulai kericuhan*"[16]

Maksud dari pernyataan narasumber di atas bahwa menjelang hari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dari ketua Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) dihalangi oleh kelompok massa dari anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum raya Tahun 2017. Sehingga kekesalan dari massa Partai Republik Mahasiswa (PAREM) di lampiaskan atau menanyakan hak hak mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.

Menurut buku yang ditulis oleh Syamsul Hadi Thubany partisipasi tentu tidak datang dengan sendirinya, hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat tidak serta merta terbangun secara demokratis dan partisipatif, sebab pemerintah dimanapun akan cenderung otoritarian dan sentralistik bila tidak

---

[15]Abdullah Moh Rifqi, *Wawancara*, Surabaya, 1 April 2018.
[16]Iqbal Khoiri, *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapkan pada pembatasan kekuasaan dan kontrol dari luar yang kuat. Di era otonimi daerah sekarang, munculnya wacana dan gerakan partisipasi bukan semata inisiatif dari pemerintah, melainkan juga karena peran kekuatan-kekuatan intermediary dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.[17] Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) hanyalah sebagai menanyakan serta memastikan janji-janji yang sudah di ucapkan dari anggota Kopurwa, seperti halnya yang diungkapkan oleh sekretaris Partai Republik Mahasiswa (PAREM). Seperti yang dikatakan informan; "*Sebelum memasuki hari terakhir pendaftaran ditentukan, dari pihak kita sudah datang ke Kombes, ketika kita ke Kombes Kopurwa tersebut tidak ada di Surabaya, melainkan di madura*."[18]

Narasumber menyatakan bahwa sebelum pendaftaran pemilu umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017 dari anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) sudah melakukan lobbiying serta menanyakan tentang persyaratan untuk mengikuti pesta demokrasi kampus pada tahun 2017. Sungguh sistem pemilihan presiden mahasiswa di Tahun 2017 harus benar-benar di perbaiki sehingga tidak menjadi panutan bagi regenerasi selanjutnya. Ketua Kopurwa yang semestinya harus standbay dari pembukaan sampai berakhir pendaftaran pemilu, namun Kopurwa di tahun 2017 ini malah melarikan diri. Berbagai alasan yang di persembahkan oleh ketua Kopurwa untuk mencegah agar tidak ada pasang calon lagi yang mengikuti pesta demokrasi di kampus tercinta ini yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Seperti pernyataan

[17]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).
[18]Abdulloh Moh Rifqi, *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informan: "*Satu hari dua kali saya dan sahabat sahabat berbondong-bondong datang ke Kombes untuk menanyakan kepastian persyaratan mengikuti PEMIRA, serta ingin bertemu dengan ketua Kopurwa selaku pemegang stempel*."[19]

Dari paparan narasumber diatas bahwa anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan sistem yang mempengaruhi kegagalan untuk mengikuti kontes demokrasi pemilihan presiden mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Senadah dengan isi dalam buku *Partisipasi Semu keterlibatan warga dalam pembangunan Desa* bahwa partisipasi merupakan voice yaitu hak dan tindakanwarga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.[20]

Hal ini juga disampaikan oleh anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) yang ikut ketika akan menemui ketua Kopurwa di Komisariat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya PMII cabang Surabaya.

> "*Kopurwa sekarang bukan hanya tidak bijak tapi juga tidak jelas. karena kantornya juga belum jelas dan aturan aturan yang dibuatnya sangat tidak masuk akal. "Hingga saat ini KOPURWA belum bisa ditemui, meski dihubungi berkali-kali lewat telfon tidak diangkat. Informasi terahir menurutnya KOPURWA nya sekarang masih ada di Sumenep Madura*."[21]

Kesulitan dari anggota Partai Republik Mahasiswa (PAREM) untuk bertemu dengan ketua Kopurwa selaku pemegang stempel acc pendaftaran pemilu

---

[19]Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.
[20]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).
[21]Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Kurangnya sosialisasi dan mendadaknya Tim Komisi Pemilu Raya Mahasiswa Kopurwa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam menginformasikan pemilu raya membuat mahasiswa yang mau mencalonkan diri maju di pemilu raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017 gagal. Pasalnya informasi Pemilu raya tersebut ditempelkan sangat mendadak. Seperti yang diungkapkan oleh ketua partai Partai Republik Mahasiswa (PAREM).

> "*Hari senin pagi bulan April kaloh tidak salah tahun 2017, sedangkan pendafatarnnya juga pada hari itu, dengan nominasi waktu 5 jam terhitung dari pukul 08 sampai jam 12 siang. Kopurwa sangat tidak bijak karena masih ada keberpihakan kepada salah satu calon, padahal Kopurwa harus netral dan tidak boleh berpihak. "kopurwa sangat berpihak kepada partai satunya hingga kami di jegal*".[22]

Kopurwa melakukan sosialisasi terkait pembukaan pendaftaran pemilihan umum raya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sangatlah mendadak, Kopuwa menempelkan panflet atau pengumuman dalam waktu lima jam, pengumuman tersebut di ketahui oleh mahasiswa hari senin pagi sampai senin siang. Hal ini lah yang membuat kemarahan dari anggota Partai yang tidak bisa mengikuti kontestas demokrasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Menurut Mohtar Mas'oed bahwa tindakan dari anggota partai yang tidak dapat mengikuti kontestan merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yaitu bentuk non konvensional. Non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal maupun ilegal, penuh kekerasan dan revulusioner, seperti halnya pengajuan

[22]Abdul Mahen, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, tindakan kekerasan politik terhadap manusia, perang gerilya dan revolusi.[23]

Aspek efektif menyangkut tentang sikap mendukung atau menolak terhadap sitem politik yang berlangsung, dan aspek evaluatif adalah sebagai kontrol terhadap pemerintah dengan dasar nilai-nilai moral yang dimiliki oleh masyarakat, aspek-aspek ini saling berkaitan dengan mempengaruhi tingkat partisipasi politik.[24] Kesadaran individu dan masyarakat untuk melakukan partisipasi politik sangat terkaitan dengan pemahaman mereka terhadap sistem politik, secara langsung maupun tidak langsung disenangi maupun tidak masyarakat maupun penguasa mendapatkan sosialisasi politik dan pendidikan politik. Usaha seperti itu jelas bertujuan mengarahkan proses sosialisasi politik masyarakat ke arah tertentu, misalnya kearah perkembangan sikap dan tingkah laku politik yang demokrasi.

Secara teoritik, desentralisasi sangat berpotensi menciptakan trnsparansi dan akuntabilitas publik dan bisa menjadi modal utama bagi penumbuhan demokrasi di tinggkat lokal.[25] Namun sayangnya, kebijakan desentralisasi itu sendiri otomatis tidak mengundang minat para penyelenggara pemerintahan lokal untuk membangun iklim demokrasi dan tata pemerintahan lokal untuk membangun iklim demokrasi dan tata pemerintahan lokal untuk membangun iklim demokrasi dan tata pemerintahan yang baik sebagaimana contoh banyaknya

---

[23]Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* ( Yogyakarta: Gadja Mada University, 1993), 47.
[24]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).
[25]Syamsul Hadi Thubany, Ismail Amir dan Muhimmudin, *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa* (Tuban: Bina Swagiri, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kesalahan manajemen dan penyalagunaan kekuasaan di daerah selama ini.[26]

Kegagalan untuk mencalonkan menjadi calon presiden mahasiswa yang diusung oleh Partai Republik Mahasiwa (PAREM) menimbulkan dampak yaitu Konflik antar mahasiswa, yang dimaksud disini adalah adanya disharmonisasi atau ketidak harmonisan yang terjadi antar anggota atau pendukung dari masing-masing partai, yaitu antara Partai Republik Mahasiswa(PAREM) dan Partai Revoulusi Mahasiswa (PRM). Ketidakharmonisan ini biasanya dilatarbelakangi oleh kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu atau adanya kebijakan-kebijakan yang memihak pada salah satu kubu partai. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dari Partai Republik Mahasiswa (PAREM): "*Adanya ketidak harmonisan atau ketidak akuran di internal mahasiswa atas terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran dan sering kali KOPURWA berat sebelah dalam menentukan kebijakan*"

Adanya disharmonisasi ini memang sering terjadi dalam setiap pemilu umum raya mahasiswa, karena pemilu umum raya mahasiswa juga sifatnya kompetisi yang hasil akhirnya adalah menang atau kalah. Namun dalam penyelenggaraan pemilu raya ini salah satu partai tidak bisa mendaftarkan calonnya, yaitu partai Partai Republik Mahasiswa(PAREM) yang gagal meloloskan kandidatnya menjadi presiden mahasiswa Universitas IslamNegeri Sunan Ampel merasa bahwa dalam pemilu ini banyak permainan politik dan tidak

[26]Rohmah,Iffah Hidayatur, Konflik Internal Gerakan Mahasiswa: Studi Konflik Politik PMII Rayon Tarbiyah Komisariat IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya dengan PMII Komisariat Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Surabaya Selatan ( Skripsi, Pendidikan SejarahFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2012) 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adilnya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa(KOPURWA) dalam menentukan kebijakan. Mereka merasa banyak kecurangan yang dilakukan dalam pra pemilu umum raya mahasiswa, terutama dalam proses verifikasi dan kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan bersama ketika Kongres Besar Mahasiswa Universitas. Seperti dari hasil wawancara:

> "*kinerja mereka kurang objektif. Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka masih diback up oleh organisasi ekstra. Dan tidak heran jika pemilu kali ini diwarnai permainan politik. Karena pemilu juga merupakan ladang meraih kekuasaan bagi mereka, apalagi pemilu setingkat DEMA*"[27]

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum raya mahasiswa tahun 2017 menjadi kurang ideal, karena ditemukan kesalahan-kesalahan dari pihak lain yang dibenarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KOPURWA) serta dari anggota Partai Repulik Mahasiswa (PAREM) melihat mereka terkesan sama-sama sekubu. Misalnya dalam pencoblosan tiba-tiba adanya penambahan kertas suara yang belum disepakati dan dirapatkan oleh masing-masing ketua partai maupun anggota Komisi Pemilhan Umum Mahasiswa (KOPURWA). Kurangnya Independensi dikarenakam Komisi Pemilhan Umum Mahasiswa (KOPURWA) belum bisa berdiri sendiri. Dalam arti adanya Komisi Pemilhan Umum Mahasiswa (KOPURWA) masih di *back up* oleh salah satu organisasi ekstra yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Oleh karena itu ada pendapat dari sebagian informan yang mengatakan bahwa pemilu kali ini masih diwarnai permainan politik dari organisasi ekstra kampus. Hal ini yang mengakibatkan

[27]Jaka Yulianto, Wawancara, Surabaya, 16 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan yang dikeluarkan Komisi Pemilhan Umum Mahasiswa (KOPURWA) tidak lagi bersifat objektif atau hanya memihak kepada salah satu golongan yang berkepentingan.

**Tabel 4.1**
**Relevansi dengan teori partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson**

| | |
|---|---|
| 1. Kegiatan Pemilihan. | Kegiatan pemilihan yang ada di UINSA Surabaya dilakukan dengan kampanye untuk mencari dukungan dan mencari suara agar dapat memenangkan pemilihan tersebut. |
| 2. *Lobby*. | Upaya mahasiswa untuk menghubungi pimpinan kampus dengan maksud dapat mempengaruhi keputusan pimpinan kampus tentang sesuatu isu yang ada pada saat pemilihan. |
| 3. Kegiatan Organisasi. | menyangnkut kegiatan-kegiatan seseorang sebagai anggota organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pejabat tertinggi dikampus. |
| 4. *Contacting* (mencari koneksi) | Mencari koneksi yaitu tindakan seseorang mencari dukungan dari pihak yang memeliki jabatan tinggi sperti Dekan dan Rektor. |
| 5. Tindakan Kekerasan. | Tindakan kekerasan ini dilakukan oleh kandidat sendiri atau tim sukses guna mendapatkan posisi pertama. Seperti memanipulasi jumlah surat suara dan membakar surat suara lawannya. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 4.2**
**Relevansi Faktor-faktor yang mempengaruhi paritisipasi mahasiswa menurut Keimer**

| | |
|---|---|
| 1. Modernisasi. | Tidak ada perubahan yg baik dari tahun ke tahunya dan mahasiswa ingin adanya suatu usaha perubahan dari para calon gubernur dan wakil gubernur yaitu perubahan yang lebih baik lagi dari gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya. |
| 2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. | Terjadinya proses berubahnya kelas sosial yang rendah dan kelas sosial tinggi yang ada dilingkungan mahasiswa dan tidak ada program yang nampak dari BEM itu berpengaruh dalam mempengaruhi partisipasi mahasiswa. |
| 3. Meluasnya partisipasi mahasiswa. | Mahasiswa semakin menyadari pentingnya berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan dengan Semakin meluasnya partisipasi mahasiswa disini dapat meningkatkan jumlah suara atau partisipasi saat pemilu raya. |
| 4. Konflik-konflik diantara pimpinan-pimpinan kampus. | Konflik pimpinan-pimpinan kampus ini yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa atau para calon gubernur yang dari organisasi ekstra kampus. |
| 5. Tindakan Kekerasan Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. | Pimpinan kampus terlalu membantasi organisasi yang ada dikampus. Seperti melarangnya organisasi ekstra kampus yang menurutnya sebagai lawan pokitik. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Hubungan Organisasi Ekstra dengan Partai Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Tahun 2017

Organisasi ekstra di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan peran penting dalam memberikan pendidikan politik. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah pendidikan politik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Organisasi ekstra mempunyai hubungan dalam perebutan kursi kekuasaan yang ada di kampus seperti HMP, HMJ, DEMA Fakultas dan Dema Univeraitas dengan melalui anggota yang sudah terorganisir di setiap distrik.

Dalam konteks ini, penulis lebih memfokuskan pada hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan anggota organisasi ekstra yang terorganisir untuk menduduki kursi Dewan Eksekutif Mahasisa Universitas. Pada salah satu bunyi draf Kongres Besar Mahasiswa UINSA bahwa setiap calon presiden mahasiswa harus diusung dari partai yang sudah terdaftar, dalam hal ini seperti Partai Republik Mahasiwa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiwa (PRM). Kedua partai tersebut selalui mengikuti atau mendaftarkan anggotanya untuk bertarung dalam merebutkan kekuasaan.

Mahasiswa yang memiliki eksisitensi di negeri ini bahkan memiliki peran straregis yang berperan aktif dalam kemerdekaan indonesia sebagai kasta sosial. Organisasi mahasiswa mempunyai peran penting dalam berafiliasi dengan partai politik dan pemerintahan tertentu walaupun tidak secara eksplisit dan mempunyai nilai-nilai nasionalis yang sangat kental dalam membangun bangsa dan negara karena sudah jelas bahwa organisasi mahasiswa ekstra kampus ini berafiliasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan partai politik yang menjadi landasan berdirinya negara dan pemerintahan saat ini. Peran tersebut merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut

Partai politik mahasiswa muncul dari ideologi mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra dan setiap anggota organisasi ekstra yang akan menduduki atau menjadi anggota di partai politik mahasiswa tersebut. Dewasa ini untuk mengembangkan organisasi yang diikuti dengan cara materi, tanpa materi untuk mengembangkan organisasi tersebut merasa kekurangan. Sebagaimana yang dikatakan informan: "*Organisasi ekstra seperti PMII tak akan bisa berkembang bila tak ada uang. Uang memang bukan segalannya tapi segalanya membutuhkan uang*."[28]

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dengan mengandalkan modal materi (dana), sebuah organisasi akan lebih mudah untuk dikembangkan dan memperbanyak kader. Setiap organisasi pasti mempunyai prestasi masing-masing, namun bila tak ada konsumsi dari instansi tersebut akan terasa hambar. Mengandalkan dari pendapatan proposal pun terkadang tak memenuhi untuk mensukseskan agenda-agenda yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya.

[28]Faiz Khan, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi ekstra untuk mengembangkan keorganisasiannya, masing-masing dari anggota organisasi yang mengatasnamakan secara akademisi tersebut melakukan perekrutan kader. Perekrutan kader ini dilakukan untuk memperbanyak kuantitas anggota dari masing-masing organisasi ekstra atau anggota yang akan menduduki struktur partai mahasiswa yang berbeda komando ini, yakni satu dibawah naungan cabang Surabaya dan satunya lagi dibawah naungan cabang Surabaya Selatan. Seperti pernyataan informan:

"*sekarang gini loh pak, yang menduduki struktur partai itu pasti anggota organisasi, yang menjalankan dan yang akan berjuang untuk mendapatkan kursi intra itu juga anggota organisasi ekstra yang sudah terorganisir*"[29]

Sama halnya yang dikatan oleh salah satu informan mengenai tentang bagaimana hubungan antara ormek dengan partai mahasiswa. Ia mengatakan: "*orang yang ditunjuk sebagai anggota sebagai anggota partai adalah aktivis yang aktiv di organisasi yang bisa memberikan efek baik kepada organisasi masing-masing*"[30]

Narasumber menyatakan bahwa hubungan antara organisasi ekstra dan partai politik mahasiswa itu saling beriringan, anggota yang terstruktur di partai mahasiswa tersebut merupakan hal yang sudah dikonsep atau manifes dari organsasi ekstra. Banyaknya kader di organisasi ekstra merupakan penentu untuk partai mahasiswa itu tetap muncul di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, serta tetap ikut pesta demokrasi kampus. Hal ini senadah dengan Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya

[29]Iqbal Khoiri, *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2018.
[30] Adi, *Wawancara*, surabaya, 16 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memeperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum.

Perekrutan kader pun dilakukan sebagai bagian dari reorganisasi internal organisasi tersebut. Karena tanpa sebuah reorganisasi maka sebuah organisasi tidak akan pernah ada kembali dan mampu berkembang. Sehingga dengan reorganisasi visi dan misi yang telah terumuskan oleh para pendiri dan pelopor organisasi akan diteruskan oleh kader-kader selanjutnya. Mayoritas pengurus DEMA adalah orang-orang organisasi ekstra dalam hal ini yaitu PMII Surabaya dan PMII Surabaya Selatan, sehingga sistem PKKMB dikendalikan oleh kader kedua PMII. Posisi organisasi ekstra atau partai politik yang kalah dalam pertarungan perebutan jabatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas hanya berdiam diri dan mengikuti alur yang telah dimainkan oleh Presiden Mahasiswa dan anggota yang sudah terstruktur.

Banyaknya panitia PKKMB, secara tidak langsung menjadi poin lebih yang dijadikan alat hegemoni untuk merekrut mahasiswa-mahasiswi baru yang *notabene*-nya belum mengetahui apa-apa mengenai organisasi ekstra yaitu organisasi PMII cabang Surabaya dan PMII cabang Surabaya Selatan. Jadi yang diharapkan oleh panitia PKKMB sekaligus kader PMII, *mainset* pertama kali yang dibangun untuk mahasiswa-mahasiswi baru adalah PMII cabang Surabaya maupun cabang Surabaya Selatan merupakan organisasi yang orang-orang di dalamnya unggul dan berkualitas, serta layak dijadikan referensi utama untuk mengembangkan potensi diri melalui keorganisasian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitia PKKMB sekaligus kader PMII cabang Surabaya maupun cabang Surabaya Selatan juga menggunakan jargon-jargon tertentu untuk merekrut kader, yang sebelumnya sudah dikonsep oleh panitia. Jargon-jargon tersebut menjadi simbol identitas dari PMII cabang Surabaya dan PMII cabang Surabaya Selatan. Sebagaimana yang ia katakan:

> "*Jargon-jargon tersebut contohnya seperti, selamat datang di UINSA Sunan Ampel Surabaya, Sedang dimana kalian? maka jawabannya: di Surabaya atau Surabaya Selatan. Lalu, Suara kalian tidak hanya menggetarkan gema ini tapi juga menggetarkan Surabaya atau Surabaya Sekatan seperti itu, dan banyak lagi saya nggak hafal. Ada juga jargon yang bentuknya seperti permainan anak-anak kecil. Sebelumnya jargon-jargon tersebut sudah direncanakan bersama panitia yang lain sebagai alat hegemoni untuk merekrut kader baru*".[31]

Narasumber menyatatakan bahwa jargon-jargon tersebut dieksplorasikan saat memulai mengisi materi dan saat istirahat atau jadwal ishoma untuk menghegemoni kader baru. Hal tersebut sebagai sarana rekrument organisasi untuk mencari dan mengajak mahasiswa untuk turut aktif dalam kegiatan atau kaderisasi sebagai anggota organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Surbakti bahwa rekrutmen politik adalah pemilihan atau seleksi terhadap seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan juga dalam pemerintahan. Fungsi ini semakin besar posisinya di mana partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau partai politik ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Pengertian

[31]Faiz Khan, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.[32]

Dalam hal ini Hegemoni organisasi PMII-S maupun PMII-SS dapat disebut sebagai doktrinasi organisasi ekstra kampus terhadap mahasiswa. Mahasiswa telah dikonsep agar membutuhkan PMII sebagai salah satu ideologi mereka, secara tidak sadar mahasiswa mengalami penindasan yang tidak mereka rasakan, adanya organisasi ekstra kampus PMII-S maupun PMII-SS ini membawa dampak yang tidak disangka-sangka. Kedua oraginasi tersebut telah menjelma menjadi kebutuhan primer (pokok) dan kebutuhan sekunder mahasiswa. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu narasumber:

> *"PMII ini sudah menjadi kebutuhan pribadi saya, bagi aya PMII bisa menjadi kebutuhan primer dan sekunder, ntuk kebutuhan primernya seperti saya mencari ilmu dan berproses di PMII, sedangkan kalok kebutuhan primernya seperti saya bisa mendapat teman baru dan secara tidak angsung bisa membuat saya banyak dikenal mahasiswa lainnya."*[33]

Kebutuhan mahasiswa secara intektual dapat terpenuhi ketika mereka mengikuti PMII, mereka dengan dapat melakukan kegiatan proses belajar yang efektif dan produktif dengan mengikuti PMII. Mahasiswa saat ini menjadikan PMII sebagai kebutuhan mereka, ada dua kebutuhan mahasiswa mengikuti PMII yang diungkapkan oleh sahabat Faris Khan yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Hegemoni PMII merubah pola fikir mahasiswa saat ini. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perilaku mahasiswa yang mulai berfikir instan. Hal tersebut dapat terlihat ketika mahasiswa saat ini lebih memilih PMII sebagai

---

[32]Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Mediasarana, Jakarta. 43
[33] Faiz Khan, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan primer dalam proses belajar yang fektif dan produktif dari pada belajar dibangku kuliah.

Selain itu, mahasiswa dan organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) saling terikat dari segi timbal baliknya, apa yang diberikan PMII kepada mahasiswa dan apa yang mahasiswa (kader PMII) yang diberikan terhadap PMII. Hal tersebut menjadi satu-kesatuan sehingga memunculkan bahwa antara PMII dan mahasiswa (kader PMII) mempunyai ikatan yang kuat dan sinergi sehingga terciptalah yang namanya integrasi sosial.

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tidak asing dengan Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM), apalagi dengan aktifis mahasiswa yang termasuk juga anggota organisasi ekstra tentu saja kedua nama partai itu tak asing di telinganya. Seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah: *"Pertarungan perebutan jabatan antara PAREM dan PRM sudah gak asing lagi bagi mahasiswa UINSA, malahan ini sudah saya anggap tradisi di kampus UINSA setiap tahunnya"*.[34]

Narasumber menyatakan bahwa perebutan jabatan kekuasaan yang ada di kampus UINSA selalu diikuti oleh kedua partai yaitu Partai Republik Mahasiswa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM). Akan tetapi dalam pemilu raya mahasiswa, kandidat yang lolos verifikasi hanya dari latarbelakang ideologi yang sama yaitu dari organisasi PMII, hanya terbedakan dari segi internal dan eksternal. Di mana dari segi internal yaitu untuk fungsionalisasi efektifitas kader, pemaksimalan potensi kader, dan memperbanyak kader. Sedangkan faktor

[34]Jaka Yulianto, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksternalnya yaitu karena di UIN Sunan Ampel merupakan organisasi PMII yang mendominasi para mahasiswa di kampus tersebut. Tidak bisa dipungkiri lagi bila menyebut nama kedua nama partai tersebut pasti tidak lupa siapa yang mem*backup*-nya. Partai Republik Mahasiswa (PAREM) didominasi atau dilatarbelakangi oleh kader PMII cabang Surabaya Selatan, sedangkan Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) didominasi oleh kader dari PMII cabang Surabaya. Seperti hasil wawancara:

> "*anggota partai PRM itu diduduki oleh mahasiswa yang ikut oraganisasi PMII Surabaya dan PAREM anggotanya dari PMII cabang Surabaya Selatan. Ya emang adanya nama partai PRM dan PAREM itu memang mahasiswa atau aktifis organisasi yang mempunyai keinginan membentuk partai tersebut*"[35]

Terkait soal pembuatan kebijakan adalah pihak yang berwenang dalam hal pemerintahan. Seperti dalam proses pemilihan raya (PEMIRA) dewan eksekutif mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berwenang dalam membuat kebijakan adalah MUSEMA pada saat kongres Besar Mahasiswa Universita dan KOPURWA dalam pelaksanaan pemilihan raya. KOPURWA membuat kebijakan-kebijakan mulai dari syarat-syarat pencalonan dan model pemilihan. Tetapi pada prakteknya dalam proses pemilihan terdapat kebijakan-kebijakan yang mempersulit para calon kandidat dan bahkan cuma menguntungkan satu pihak kandidat saja. Walaupun kebijakan dari KOPURWA mengaca pada Sidang KBMU tetapi masih terdapat kesenjangan dalam prosesnya. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Partai Revolusi Mahasiswa (PRM) yang mengatakan:

> *"kita melengkapi syarat-syarat dari kopurwa sulit. Karena dalam pemberitahuan persyarat-persyaratan yang dibuat oleh kopurwa menurut*

[35]Abdul Mahen, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*saya sangat mendadak. Itu cuma dikasih waktu seminggu pada jam aktif kuliah jadi cuma 5 hari untuk melengkapi pendaftaran pemilihan itu yang membuat kandidat kesulitan."*[36]

Namun hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh ketua partai PAREM (Partai Republik Mahasiswa) yang mengatakan:

*"kebijakan kopurwa dalam persyaratan itu ada yang sulit ada yang tidak. Kalau yang sulitnya mungkin IPK. IPK itu harus 3.00 sebenarnya malah persyaratan IPK harus 3.25 setelah itu menyebabkan lobi-lobian agar dipermudah".*[37]

Apakah ini termasuk politik kekuasaan? Bisa jadi jawabanya ya. Karena dari awal terdapat proses-proses penyimpangam yang menguntungkan pihak-pihak yang mendominasi di dalam pemerintahan kampus. Dan untuk memenangkan sebuah kekuasaan tersebut para kandidat partai harus merancang sebuah strategi-strategi yang matang untuk memenangkan sebuah kekuasaan itu.

Narasumber juga menyatakan bahwa anggota terstruktur dari kedua partai itu dari para mahasiswa yang menjadi kader PMII cabang Surabaya maupun cabang Surabaya Selatan. Hal ini seperti bentuk atau strategi untuk mengembangkan organisasi yang ditekuni sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan kader yang lebih banyak dan merupakan fungsi umum oraganisasi ekstra yang mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan ideologi tertentu dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum raya mahasiswa. Hal ini senadah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang fungsi organisasi atau partai politik yang berbunyi di mana salah satu fungsi utama partai politik

[36] Muhammad Said, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.
[37] Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.[38]

Di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya partisipasi politik adalah kegiatan yang diangap kontrovesial di mana semua mahasiswa tidak mempunyai hak pilih dalam pemira, sehinga terbentuk lembaga keterwakilan untuk mewakili suara mahasiswa. Fakta di lapangan ada lembaga keterwakilan yang mendominasi dari salah satu pihak, sehingga pemira dianggap kurang adil dan dianggap kurang memuaskan.

Dalam pemira ini ada 2 partai yang ikut berpartisipasi yaitu Partai Revolusi Mahasiswa dan Partai Republik Mahasiswa, di mana Partai Revolusi Mahasiswa adalah cerminan dari PMII Surabaya kemudian Partai Republik Mahasiswa adalah cerminan dari PMII Surabaya selatan, dalam hal ini jauh sebelum adanya pemira 2 organisasi tersebut memiliki konflik yang belum terselesaikan sehingga berdampak pada pemira 2017.

Kritik dan respon mahasiswa terkait politik kampus yang terjadi pada pemilihan umum raya mahasiswa pun tidak jarang dilontarkan oleh berbagai kalangan mahasiswa yang *notabene*-nya abu-abu. Banyak respon terkait politik kampus yang digemborkan tidak lah sehat. Politik kampus hanya dikendalikan oleh golongan mahasiswa yang mendominasi di lingkungan sistem keorganisasian intra kampus. Bukan menjadi persoalan lagi bila kampus dijadikan tempat belajar politik. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa praktik politik yang tidak bersih dan

[38]Iffah Hidayatur Rohmah, Konflik Internal Gerakan Mahasiswa: Studi Konflik Politik PMII Rayon Tarbiyah Komisariat IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya dengan PMII Komisariat Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Surabaya Selatan ( Skripsi, Pendidikan SejarahFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, 2012) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung rakus jabatan yang membuat belajar politik di kampus menjadi hal yang menjijikan untuk dilihat atau bahkan diikuti. Karena memungkinkannya geramnya mahasiswa terkait politik kampus tersebut sampai mempengaruhi tingkat partisipan mahasiswa terhadap pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Milada Romadhoni Ahmad, selaku ketua organisasi ekstra IMM 2017 yang mengatakan:

> *"Politik yang terjadi kampus pas pemilihan umum raya itu, menurut saya masih mencerminkan demokrasi elite. Demokrasi elit yang saya maksud adalah demokrasi yang hanya dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang mendominasi di sistem. Sehingga demokrasi tersebut ecara tersirat hanya dimiliki oleh golongan tertentu. Bahkan partisipan mahasiswa juga belum menyeluruh"*[39]

Berbeda lagi bagi organisasi mahasiswa ekstra HMI seperti yang diungkapkan oleh Luqman Hakim, selaku ketua HMI 2017 yang mengatakan:

> *"Politik kampus adalah entitas yang mesti diperjuangkan. Dan responnya pun bukan berkonotasi negatif seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa yang notabene-nya mahasiswa abu-abu. Melainkan sebagai usaha untuk menghidupkan kultur gerakan mahasiswa dan membangun kesadaran atas kondisi yang melanda negeri ini. Menduduki posisi sebagai presiden kampus (Dewan Eksekutif Mahasiswa) dengan struktur-struktur di dalamnya misalnya, secara tidak langsung turut membantu usaha perbaikan masyarakat kampus agar lebih respon dan mampu bergerak dalam memberikan solusi. Di waktu yang sama juga membelajarkan hakekat berpolitik bagi mahasiswa. Baik tentang kepemimpinan, keorganisasian, strategi dan taktik, hingga kebijakan kampus."*[40]

Bagi kalangan aktivis mahasiswa memang jelas bahwa politik kampus sebagai wadah untuk membangun kesadaran kritis bagi mahasiswa terkait kondisi sosial politik yang terjadi di lingkungan masyarakat nantinya. Di samping itu, pihak UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri juga sangat memfasilitasi organisasi-

---

[39] Milada Romadhoni Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2018.
[40] Luqman Hakim, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi yang mau berkembang, tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa-mahasiswa di dalamnya, dan hal tersebut bertujuan untuk membentuk suatu partisipasi politik yang akan berdampak pada kepemimpinan DEMA selanjutnya, dalam hal ini bentuk patisipasi di UIN Sunan Ampel Surabaya cenderung ke bentuk non konvensional karna banyak ditemukan tindakan kekerasan dan konflik antara dua organisasi tersebut.

Jauh sebelum terlaksanakannya PEMIRA mahasiswa baru sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin yang berpihak dari salah satu organisasi tersebut yang berdampak pada pola pikir mereka terhadap partisipasi politik kampus di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Atas dasar uraian dalam bab-bab yang telah dianalisis, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama,* berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang pertama terkait organisasi ekstra kampus dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa pada pemilihan umum raya di UINSA Surabaya tahun 2017, bisa disimpulkan bahwa organisasi ekstra kampus memberikan pandangan politik kampus karena dalam PEMIRA tidak luput dari politik kampus kepada mahasiswa agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum raya. Starategi yang dilakukan yaitu strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya ahasiswa melalui anggota organisasi ekstra (PMII, HMI, GMNI, IPNU, IMM) lain yang sudah menjabat di HMJ dan Gubernur serta pemimpin organisasi yang mempunyai anggota banyak dan mengkader mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya lebih banyak untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini organisasi ekstra memanfaatkan anggotanya untuk mencari massa yang berupa mengumpulkan Kartu Tanda Mahasiswa. Mengumpulkan KTM merupakan sebagian syarat administrasi untuk meloloskan partai dan calon yang di dukung dari partai tersebut.

*Kedua,* sedangkan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang kedua terkait hubungan organisasi ekstra dengan partai politik mahasiswa dalam



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan umu raya mahasiswa di tahun 2017, melihat bahwa Partai politik mahasiswa muncul dari ideologi mahasiswa yang mengikuti organisasi ekstra dan setiap anggota organisasi ekstra yang akan menduduki atau menjadi anggota di partai politik mahasiswa tersebut. Pada salah satu bunyi draf Kongres Besar Mahasiswa Universitas bahwa setiap calon presiden mahasiswa harus di usung dari partai yang sudah terdaftar, dalam hal ini seperti Partai Republik Mahasiwa (PAREM) dan Partai Revolusi Mahasiwa (PRM). Kedua partai tersebut selalui mengikuti atau mendaftarkan anggotanya untuk bertarung dalam merebutkan kekuasaan. Organisasi ekstra untuk mengembangkan keorganisasiannya, masing-masing dari anggota organisasi yang mengatasnamakan secara akademisi tersebut melakukan perekrutan kader. Perekrutan kader ini dilakukan untuk memperbanyak kuantitas anggota dari masing-masing organisasi ekstra atau anggota yang akan menduduki struktur partai mahasiswa yang berbeda komando ini, yakni satu dibawah naungan PMII cabang Surabaya dan satunya lagi dibawah naungan PMII Cabang Surabaya Selatan.

## B. Saran

Mahasiswa yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sisitem jalannya pesta demokarasi di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memperhatiakan keadaan dan kondisi mahasiswa yang ingin mengikuti demokrasi. Serta pemimpin harus lebih transparansi dalam pembuatan kebijakan dan melakukan pekerjaannya. Sehingga tidak ada konflik yang akan adatang di regenerasi selanjutnya terkait problem Pemilihan Umum Raya Mahasiswa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemiihan organisasi intra.

Untuk kelanjutan penelitian ini di tahun mendatang agar bermanfaat terhadap dunia keilmuwan dan kajian politik khususnya di UINSA Surabaya, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, yaitu:

1. Sebaiknya panitia Pemilihan Raya UINSA Surabaya lebih memanjangkan waktu sosialisasi pada penyusunan tahapan pemilihan Raya karena hal ini sangat mempengaruhi partisipasi mahasiswa untuk turut aktif pada pesta pemilihan Raya.
2. Pada saat pemilihan waktu, kiranya dapat mempertimbangkan kalender akademis, dimana diperhatikan kapan waktu-waktu yang akan berdampak pada rendahnya partisipasi mahasiswa khususnya ketika ujian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

**1. Sumber Buku:**


Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Asfar, Muhammad. *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Jakarta: PuSDeHAM, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarata: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Fajar Interpratama, 2007.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Huntington, P. Samuel dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Mas'oed, Mohtar dan Mac colin, Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadja Mada University, 1993.

Murhiyanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Victory Inti Cipta, 2001.

Peter Harris dan Ben Reilly. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. Jakarta: International IDEA, 2000.

Raga, Marhan Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Ramlan, Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

Robert Eatwell dan Anthony Wright. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sugiyono. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R & D.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Thubany, Syamsul Hadi, Amir Ismail dan Muhimmudin. *Partisipasi Semu Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa*. Tuban: Bina Swagiri, 2004.

**2. Sumber Skripsi dan Jurnal:**

Al Hafizh, Yogie. "Perilaku Golput pada Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung". Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan, Lampung, 2016.

Asyhar, Ah. Rofiul. "Politik Kekuasaan Kampus dalam Tinjauan Perilaku Sosial". Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Marzuki. "Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999". Disertasi, Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007.

Munawaroh, Khoyin. "Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Jember, 2016.

Ridwan, Muhammad. "Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosisal, Univeristas Malang, 2015.

Rohmah, Ifah Hidayatur. "Konflik Internal Gerakan Mahasiswa: Studi Konflik Politik PMII Rayon Tarbiyah Komisariat IAIN Sunan Ampel Cabang Surabaya dengan PMII Komisariat Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang Surabaya Selatan". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2012.

Mubarok, A. I. "Pengaruh Pendidikan Politik di Organisasi Kemahasiswaan terhadap Tingkat Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Mahasiswa GMNI dan HMI di UPI Bandung)", *Jurnal Ahkam*, Vol. 01, No. 01 (Januari, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**3. Sumber Internet:**

"Peran, Fungsi dan Posisi Mahasiswa" dalam http://geowana.wordpress.com. Diakses pada jam 22.00 WIB, 4 April 2018.

"Pengertian Partisipasi Politik Menurut Pakar" dalam http://www.pengertianpakar.com. Diakses pada jam 23.45 WIB, 09 April 2018.

"Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi" dalam http://uupendidikan.com. Diakses pada jam 13.15 WIB, 10 April 2018.

"Pengertian Ideologi Politik" dalam http://www.academia.edu. Diakses pada jam 11.56, 11 Juli 2018.

**4. Sumber Wawancara**

Abdulloh Moh Rifqi, *Wawancara*, Surabaya, 7 April 2018.

Muhammad Said, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

Iqbal Khoiri, *Wawancara*, Surabaya, 23 Maret 2018.

Faiz Khan, *Wawancara*, Surabaya, 11 April 2018.

Nur Rochman, *Wawancara*, Surabaya, 9 April 2018.

Abdul Mahen, *Wawancara*, Surabaya, 3 April 2018.

Jaka Yulianto, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2018.

Adi, *Wawancara*, Surabaya, 16 Juli 2018.

Milada Romadhoni Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 30 Juli 2018.

Luqman Hakim, *Wawancara*, Surabaya, 30 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id